**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK**

**(Survey pada Dinas-Dinas Kab. Bandung)**

**DRAFT SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh**

**Ade Irmawati**

**124020359**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2016**

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK**

**(Survey pada Dinas-Dinas Kab. Bandung)**

**DRAFT SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi**

**Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan**

Bandung, Juni 2016

Mengetahui,

**Pembimbing,**

(**Ruslina Lisda, S.E., M.Si., Ak. CA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dekan Fakultas Ekonomi**  **(Dr. Atang Hermawan, SE.,M.S.I.E.,AK)** | **Ketua Program Studi Akuntansi,**  (**Dr. Hj. Isnaeni Nurhayati, SE., M.Si., Ak. CA**) |

**PERNYATAAN**

**(Program Studi Strata 1)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Pasundan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Juni 2016

Yang membuat pernyataan

**(Ade Irmawati)**

**NRP : 124020359**

**MOTTO**

“Do the best, let Allah take the rest”

*(Pascala)*

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Swt, Tuhan seluruh alam

(Qs. Al An’am : 162)

Ilmu adalah cahaya, akal adalah penglihatan batin, barang siapa yang menyinukkan diri dengan ilmu dan akal, mereka akan sukses dan terhindar dari kekhawatiran dunia dan akhirat. Inilah harapan orang yang tengah belajar. Tujuan akhir dan cita-cita mereka.

(Abu Bakar AL-Saljain)

Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk orang tuaku tersayang atas seluruh cinta, pengorbanan, kepercayaan, dan kasih sayang, kakakku tersayang, sahabat-sahabatku yang telah menemani, mewarnai dan menginspirasi hidupku, saudara-saudara seperjuanganku di Fakultas Ekonomi UNPAS dan orang-orang sekelilingku yang mecintai dan menyayangiku . . .

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling* dengan metode *proporsional sampling*. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path*), korelasi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F serta analisis koefisien determinasi. Banyaknya populasi penelitian adalah 144 orang, sampel penelitian yang digunakan adalah 74 orang dengan sumber data yang diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial implementasi Sistem informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana besarnya pengaruh Sistem informasi Keuangan Daerah sebesar 29,9%*,* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 48,2% terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan implementasi Sistem informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 49,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,4% merupakan pengaruh faktor lain di luar kedua variabel independen yang sedang diteliti, seperti *good corporate governance*. Hasil penelitian juga menunjukan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik sebesar 46,9%, sedangkan hasil analisi jalur menunjukan pengaruh implementasi Sistem informasi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan sebesar 20,5%, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan sebesar 33,0% sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,0% merupakan pengaruh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Sistem informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

***ABSTRACT***

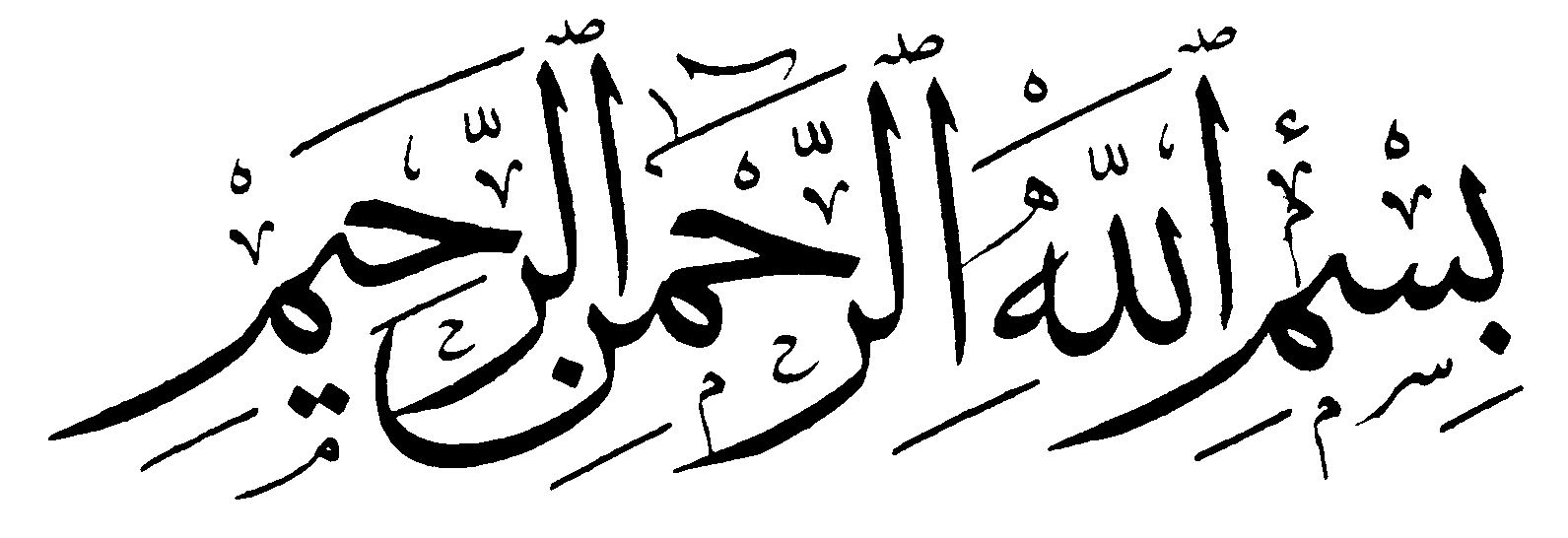
*This research aims to determine the influence of implementation of the Government Financial Information System (SIKD) and the Government Internal Control System (SPIP) to the quality of financial statements and its impact on public accountability in government offices of Bandung district.*

*The research approach used in this research is descriptive analysis and verification by using primary data. The sampling technique used is probability sampling with proportional probability sampling method. The statistical analysis used in this research is the analysis of the path (path), correlation, hypothesis testing using t test and F as well as the coefficient of determination. The number of the study population was 144 people, the study sample used is 74 people with a source of data obtained from the results of questionnaires.*

*According to the research done can be seen that the partial implementation of Government financial information system and internal control system affects the quality of government financial statements. Where the influence of the Government Financial Information System by 29.9%, and Government Internal Control System by 48.2% on the quality of financial statements.*

*Simultaneous implementation of Government financial information system and internal control system affects the quality of government financial statements amounted to 49.6%, while the remaining 53.1% is the influence of other factors outside of the two independent variables being studied, such as good corporate governance. The results also show the influence of the quality of financial reports to the public accountability of 46,9%, while the path analysis results show the effect of implementation of the Government Financial information systems of public accountability through the quality of financial reporting by 20.5%, and Government Internal Control System affect the quality of the report finance to public accountability through the quality of financial reporting by 33.0% while the remainder is equal to 67.0% is the influence of other factors outside of this research model.*

***Keywords****: Government financial information system, internal control system, the quality of financial statements and public accountability.*

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Survey pada Dinas-Dinas Kab. Bandung)**”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih banyak kekurangannya baik dalam penyajian materi maupun dalam tata bahasanya, Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan suatu bahan masukan demi kesempurnaan isi penelitian penulis dan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan tersusunnya penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada **Ibunda Isah** dan **Ayahanda Komarudin Hidayat** atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang penuh ketulusan yang penulis tidak dapat untuk menggantikannya sampai kapanpun, semoga Allah S.W.T membalasnya dengan pahala yang terus mengalir dan melimpah. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Dengan segala hormat penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Ruslina Lisda, SE., MSi., Ak. CA.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk kepentingan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom. selaku Rektor Universitas Pasundan.
2. Bapak Dr. Atang Hermawan, S.E, M.SIE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Sekaligus selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
3. Ibu Dr. Hj. Isnaeni Nurhayati, SE., M.Si., Ak. CA. selaku ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
4. Ibu Isye Siti Aisyah, SE, MSi, Ak., CA. selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
5. Para Staf Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung, serta staf keuangan dan akuntansi dinas kabupaten Bandung yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini.
6. Kakak tercinta Rini handayani, Elis Rohayati dan Nunung, serta keluarga besar Bapak Komarudin Hidayat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat yang berharga, Ayu Winengsih, Lia Yunita, Dela Astria, Widiyanti, Amelia Sarah, Nur Hasyanah, Arnie, Aries Mulya, Mery Maryanti, Sandi Ibrahim, Topal, Ari kiting, Uje, Luthvia dan Risma terima kasih atas dukungannya.
8. Keluarga besar Baraya BidikMisi Universitas Pasundan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan, Septiana, Mila, Dewi, Ririn dan teman-teman seperjuangan lainnya terimakasih.
10. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Angkatan 2012. Khususnya teman-teman di kelas Akuntansi E dan F yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, semoga amal baik serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang lebih besar dari-Nya. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2016

Penulis

Ade Irmawati

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MOTTO**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI iv**

**DAFTAR GAMBAR xi**

**DAFTAR TABEL xii**

**DAFTAR LAMPIRAN xv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

* 1. Latar Belakang Penelitian 1
  2. Rumusan Masalah 15
  3. Maksud dan Tujuan peneliti 16
  4. Kegunaan Penelitian 17

1.4.1Kegunaan Teoritis 17

1.4.2Kegunaan Praktis 18

* 1. Lokasi dan Waktu Penelitian 19

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS,**

**DAN HIPOTESIS** 20

1. Kajian Pustaka 20
   * 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah 20

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah 20

2.1.1.2 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah 23

2.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah 24

2.1.1.4 Komponen Sistem Informasi 24

2.1.1.5 Prinsip Informasi Keuangan Daerah 33

2.1.1.6 Fungsi dan Tujuan SIKD 33

* + 1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 36

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 36

2.1.2.2 Komponen dan Fungsi Pengendalian Internal 39

2.1.2.3 Prinsip Umum SPIP di Indonesia 45

* + 1. Kualitas Laporan Keuangan 50

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan 50

2.1.3.2 Fungsi Laporan Keuangan 53

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 53

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan 56

2.1.3.5 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan 64

2.1.3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 67

* + 1. Akuntabilitas Publik 69

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Publik 69

2.1.4.2 Jenis Akuntabilitas Publik 71

* + - 1. Dimensi Akuntabilitas 72
    1. Penelitian Terdahulu 76

1. Kerangka Pemikiran 78

2.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 78

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 81

2.2.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik 85

2.2.4 Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Kualitas laporan Keuangan 87

* + 1. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Melalui Kualitas Laporan Keuangan 88
    2. Bagan Kerangka Pemikiran 91
  1. Hipotesis 92

**BAB III METODE PENELITIAN 93**

* 1. Metode Penelitian yang Digunakan 93

3.1.1 Objek Penelitian 93

3.1.2 Metode Penelitian 93

3.1.3 Pendekatan Penelitian 94

3.1.4 Model Penelitian 95

1. Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel 95

3.2.1 Definisi Variabel 96

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 98

1. Populasi dan Sampel 105

3.3.1 Populasi 105

3.3.2 Sampel 106

3.3.3 Teknik Sampling 109

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 110

3.4.1 Sumber Data 110

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 110

1. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 111

3.5.1 Metode Analisis Data 111

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 117

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen 118

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 129

3.5.3 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 120

3.5.3.1 Rancangan Analisis Data 120

3.5.3.2 Pengujian Hipotesis 125

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 130**

* 1. Hasil Penelitian 130
     1. Gambaran Umum Dinas Kabupaten Bandung 130

4.1.1.1 Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 132

4.1.1.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 133

4.1.1.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 134

4.1.1.4 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 135

4.1.1.5 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 137

4.1.1.6 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 138

4.1.1.7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 139

4.1.1.8 Dinas Perhubungan 140

4.1.1.9 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan 141

4.1.1.10 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 142

4.1.1.11 Dinas Peternakan dan Perikanan 143

4.1.1.12 Dinas Sosial 144

4.1.1.13 Dinas Tenaga Kerja 145

4.1.1.14 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 146

4.1.1.15 Deskripsi Responden 148

4.1.2 Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Kabupaten Bandung 150

4.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Kabupaten Bandung 157

4.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Dinas Kabupaten Bandung 166

4.1.5 Akuntabilitas Publik Dinas Kabupaten Bandung 172

1. Pembahasan 177
   * 1. Uji Validitas 177

4.2.1.1 Uji Validitas Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1) 177

4.2.1.2 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) 179

4.2.1.3 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y) 180

4.2.1.4 Uji Validitas Akuntabilitas Publik (Z) 181

* + 1. Uji Reliabilitas 182

4.2.2.1 Uji Reliabilitas Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1) 182

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(X2) 183

4.2.2.3 Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y) 184

4.2.2.4 Uji Reliabilitas Akuntabilitas Publik (Z) 184

* + 1. Analisis data 186

4.2.3.1 Analisis Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Kabupaten Bandung 186

4.2.3.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintahpada Dinas Kabupaten Bandung 190

4.2.3.3 Analisis Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung 194

4.2.3.4 Analisis Akuntabilitas Publik pada Dinas Kabupaten Bandung 197

4.2.4 Uji Normalitas Data 199

4.2.5 Pengujian Hipotesis 201

4.2.5.1 Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 201

4.2.5.2 Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 209

4.2.5.3 Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan 211

4.2.5.4 Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung terhadap Variabel Akuntabilitas Publik 213

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 216**

* 1. Kesimpulan 216
  2. Saran 218

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 91

Gambar 3.1 Model Penelitian 95

Gambar 3.2 Model Jalur Penelitian 122

Gambar 4.1 Grafik Normalitas 200

Gambar 4.2 Diagram Jalur Persamaan I 205

Gambar 4.3 Model Diagram Jalur Persamaan II 210

Gambar 4.4Model Diagram jalur Keseluruhan 212

Gambar 4.5 Diagram Jalur Lengkap 215

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD 5

Tabel 1.2 Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintah 6

Tabel 1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 14

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 77

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Implementasi SIKD (X₁) 98

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel SPIP (X₂) 99

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Z) 101

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Akuntabilitas Publik (Y) 102

Tabel 3.5 Populasi Penelitian 105

Tabel 3.6 Penyebaran Sampel 108

Tabel 3.7 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 126

Tabel 4.1 Deskripsi Responden 148

Tabel 4.2 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Perangkat Keras 151

Tabel 4.3 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Perangkat Lunak 152

Tabel 4.4 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai *Brainware* 153

Tabel 4.5 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai prosedur 154

Tabel 4.6 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Basis Data 155

Tabel 4.7 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Jaringan Komunikasi 146

Tabel 4.8 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Lingkungan Pengendalian 158

Tabel 4.9 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Penilaian Risiko 161

Tabel 4.10 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Aktivitas Pengendalian 162

Tabel 4.11 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Informasi dan komunikasi 164

Tabel 4.12 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Pemantauan 165

Tabel 4.13 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Dimensi Relevan 167

Tabel 4.14 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Keandalan 168

Tabel 4.15 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Dimensi dapat dibandingkan 170

Tabel 4.16 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Dimensi dapat dipahami 171

Tabel 4.17 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 173

Tabel 4.18 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Akuntabilitas Manajerial 174

Tabel 4.19 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Akuntabilitas Program 175

Tabel 4.20 Distribusi Tanggapan Respondan Mengenai Akuntabilitas Kebijakan 176

Tabel 4.21 Hasil Uji Validitas Implementasi SIKD 178

Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas SPIP 180

Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan 181

Tabel 4.24 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik 183

Tabel 4.25 Hasil Uji Reliabilitas Implementasi SIKD 183

Tabel 4.26 Hasil Uji Reliabilitas SPIP 184

Tabel 4.27 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan 185

Tabel 4.28 Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Publik 185

Tabel 4.29 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian 185

Tabel 4.30 Tabulasi Jawaban Responden mengenai Implementasi SIKD 186

Tabel 4.31 Tabulasi Jawaban Responden mengenai SPIP 191

Tabel 4.32 Tabulasi Jawaban Responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan 194

Tabel 4.33 Tabulasi Jawaban Responden mengenai Akuntabilitas Publik 197

Tabel 4.34 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas 200

Tabel 4.35 Koefisien Jalur Persamaan I 202

Tabel 4.36 Hasil Uji Parsial Persamaan I 202

Tabel 4.37 Koefisien Determinasi Persamaan I 206

Tabel 4.38 Hasil Uji Simultan 207

Tabel 4.39 Koefisien Jalur Persamaan II 209

Tabel 4.40 Koefisien Determinasi Persamaan II 209

Tabel 4.41 Hasil Uji t Persamaan II 211

Tabel 4.42 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Akuntabilitas Publik 214

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 *Curriculum Vitae*

Lampiran 2 Surat Keterangan Tugas Membimbing Skripsi

Lampiran 3 Kartu Perkembangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Mengikuti Seminar Usulan Penelitian

Lampiran 5 ` Lembar Persetujuan Perbaikan Seminar Usulan Penelitian

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian di Dinas Kabupaten Bandung

Lampiran 7 Stuktur Organisasi 14 Dinas Kabupaten Bandung

Lampiran 8 Kuesioner

Lampiran 9 Data Ordinal Implementasi SIKD

Lampiran 10 Data OrdinalSPIP

Lampiran 11 Data Ordinal Kualitas Laporan Keuangan

Lampiran 12 Data Ordinal Akuntabilitas Publik

Lampiran 13 Data Interval Implementasi SIKD

Lampiran 14 Data IntervalSPIP

Lampiran 15 Data Interval Kualitas Laporan Keuangan

Lampiran 16 Data Interval Akuntabilitas Publik

Lampiran 17 Uji Validitas dan Reliabilitas Implementasi SIKD

Lampiran 18 Uji Validitas dan ReliabilitasSPIP

Lampiran 19 Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Lampiran 20 Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntabilitas Publik

Lampiran 21 Jalur dan Uji Normalitas

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan, tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability)* kepada banyak pihak yang memerlukan, salah satu diantaranya adalah pemerintah. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangannya, khususnya di bidang akuntansi kepemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. (Mardismo, 2004: 35)

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi. (Andriani, 2010).

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laoran keuangan yang berkualitas. Dimana laporan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan,dan dapat dipahami (Herawati, 2014).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah dihasilkannya laporan keuangan yang memenuhi keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetyo, 2005). Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan (Sukmaningrum, 2009).

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan pemerintahan adalah keterlambataan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Dikutip dari [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 9 April, 2015-02:50 menyampaikan laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang baru diterima laporannya pada Semester II 2014, baru 68 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Padahal berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan harus sudah disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau paling lambat pada akhir Maret.

Penegasan itu disampaikan Harry Azhar Azis dalam sambutannya pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 kepada DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

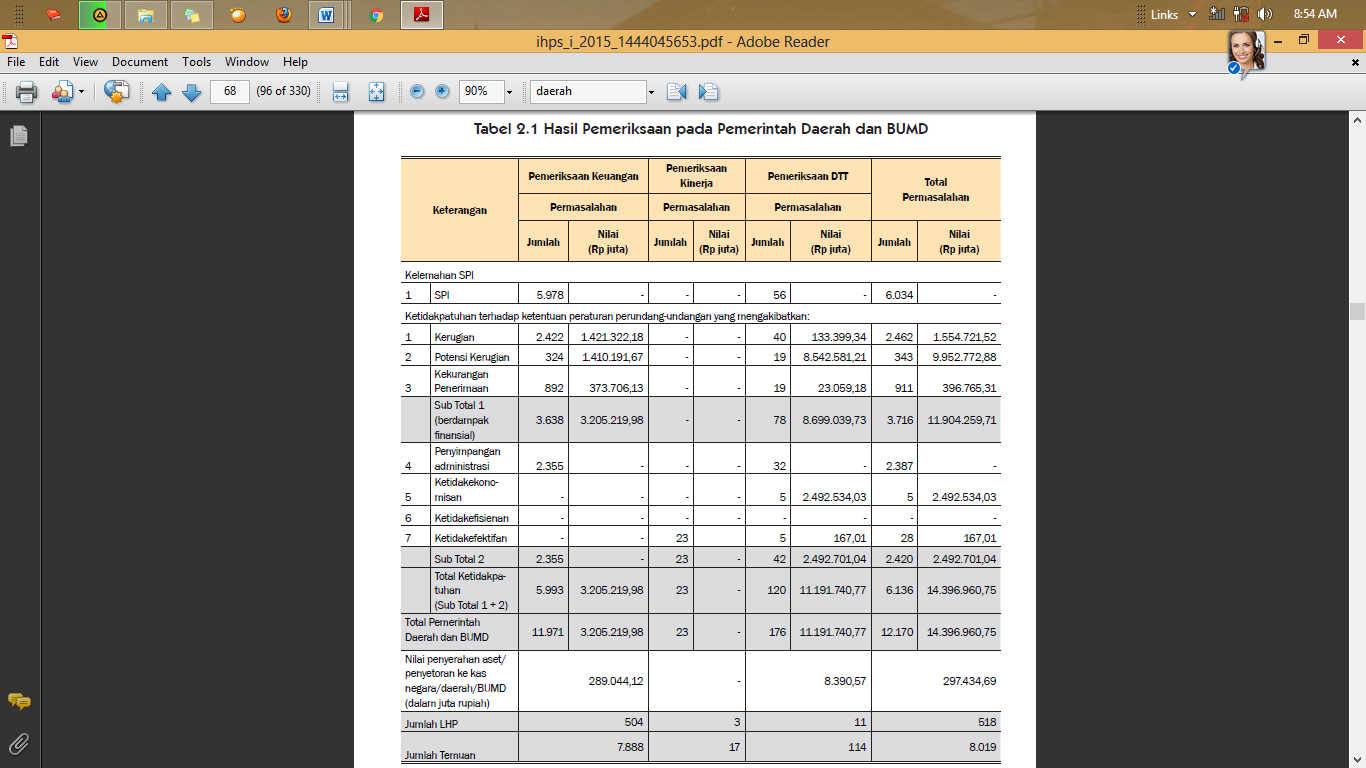
Harry mengatakan bahwa atas masih adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, BPK akan terus mendorong kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan tersebut secara tepat waktu, berdasarkan catatan BPK jumlah Pemda sampai dengan Semester II Tahun 2014 adalah 542, namun yang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2013 hanya 524 pemerintah daerah. Total asset 524 LKPD pada akhir Tahun 2013 senilai Rp 2.006,6 triliun, total kewajiban senilai Rp 21,4 triliun dan total ekuitas senilai Rp 1.990,75 triliun. Sedangkan total pendapatan dan belanja selama 2013 adalah senilai Rp 726,56 triliun, dan senilai Rp 709,77 triliun.

Dengan jumlah aset, ekuitas, pendapatan dan belanja yang besar tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam pembangunan daerah. Sehingga sudah seharusnya pemda dapat mengelola dan mengadministrasikan keuangannya dengan baik dan benar yang diukur dengan indikator perolehan opini WTP dan penggunaan keuanganan negara yang ekonomis, efisien dan efektif.

Fakta lain yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2015 menemukan 6.034 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.136 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak Rp. 11,90 triliun. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada Tabel 1.1.

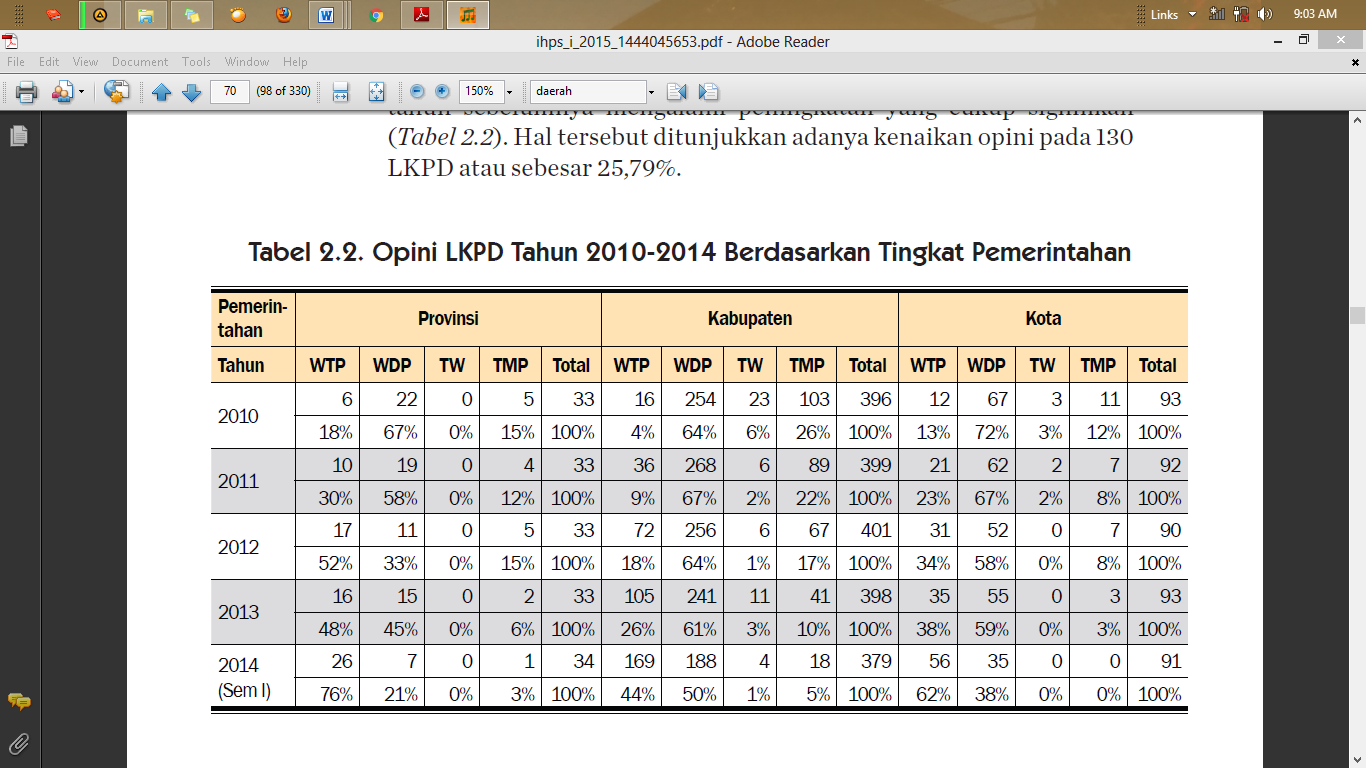
Tabel 1.1

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD



Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2015 terdiri atas 504 LKPD, yang terdiri dari LKPD provinsi, LKPD kabupaten dan LKPD kota. Daftar opini LKPD berdasar tingkat pemerintahan (Kabupaten dan Kota) sekaligus menunjukkan opini WTP baik dalam pemerintahan kabupaten maupun kota jumlahnya terus meningkat dari 3 tahun terakhir. Kabupaten Bandung termasuk salah satu kabupaten yang masih berada pada opini WDP, opini WDP ini diterima pemerintah daerah kabupaten Bandung 3 tahun berturut-turut. Opini LKPD Tahun 2014 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam table berikut.

Tabel 1.2.

 Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pada tahun buku 2009 hingga tahun buku 2014 laporan keuangan pemerintah daerah jawa barat mengalami peningkatan. Terbukti dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran (TA) 2014 oleh BPK yang menyatakan bahwa 12 pemda di Provinsi Jawa Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun Anggaran (TA) 2014 dari BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula LHP atas LKPD TA 2014 kepada 15 pemda lain di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan Kabupaten Subang. Dari 15 pemda tersebut Kabupaten Subang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *disclaimer opinion,* sedangkan empat belas entitas lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2014 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam empat tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dari BPK RI Perwakilan provinsi Jawa Barat.

Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat, pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas. Fenomena lain juga ditemukan pada akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah. Dikutip dari [www.inilah.com](http://www.inilah.com) 15/10/2015 16:00 diketahui bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias bisa dipertanggungjawabkan masih rendah. BPK telah melakukan pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atau sudah 93,51 persen diproses pada Semester I tahun 2015. Pada 2015, sebanyak 539 pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan.

Harry menjelaskan Beberapa pemerintah daerah yang nilainya C, hampir sekitar 5 persen dari sekitar 539 pemerintah daerah. Kira-kira masih ada 25 pemerintah daerah yang mendapatkan *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat), dijelaskan bahwa seluruh laporan keuangan daerah mendapatkan WTP. Pada 2013, selain itu dijelaskan juga bahwa jumlah laporan keuangan yang mendapatkan WTP hanya 29,96 persen. Jumlah itu meningkat pada 2014 menjadi 49,80 persen dari 524 pemerintah daerah yang menyusun laporan.

Masalah yang sering ditemukan di daerah biasanya terkait aset, perjalanan dinas, dan bantuan sosial. Tiga masalah itu terkait keuangan di daerah. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pemimpin dan anggota BPK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu memuat hasil pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan yang memuat 607 audit keuangan, lima audit kinerja, dan 54 audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Setiawan mengatakan, kendala keterbatasan tenaga akan dijawab dengan melibatkan auditor dari kantor akuntan publik. Hendar berkata bahwa BPK sudah mengajukan. Mulai tahun depan (tahun 2016) BPK menggunakan kantor akuntan publik.

Keterlibatan auditor swasta untuk membantu kerja pemeriksaan yang dilakukan BPK. Sejak 2015 hingga satu tahun mendatang Hendar menjelaskan bahwa BPK masih akan mendidik dan memantau kerja auditor swasta yang terbiasa melakukan audit keuangan publik, tidak mudah melepas begitu saja kerja-kerja auditor BPK yang tergolong rahasia ke auditor swasta. Harapan sebagian auditor BPK selama ini tersedot untuk audit keuangan bisa ditarik untuk audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Seperti diketahui, jumlah pegawai BPK saat ini sekitar 6.000 orang. Dari jumlah itu hanya 50-60 persen yang merupakan auditor.

Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliabel. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya, pemanfaatan teknologi informasi, sistem keuangan yang diterapkan, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal serta komitmen organisasi (Mailani, 2013). Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti pada implementasi Sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah, hal tersebut berdasar pada penelitian terdahulu yang menunjukan ketidakkonsistenan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah. Atas dasar hal tersebut maka penulis memutuskan untuk meneliti sejauh mana pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Sistem informasi keuangan selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah, dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (PP No. 65 Tahun 2010)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah pengendalian internal yang diterapkan didalam pemerintahan tersebut. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost* and *benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat, pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas. Atas dasar hal tersebut penyusun menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai sebuah variabel yang juga diteliti, yakni sejauh mana kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Simbolon, 2006).

Pada penelitian terdahulu yang juga menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen terdapat beberapa faktor yang di duga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.3.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aristanti Widyaningsih, Alvian Triantorolili, Sugeng Wiyantoro (2011) dengan judul “Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (penelitian pada laporan realisasi anggaran di pemda kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menerangkan bahwa efektifitas sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang juga berdampak kepada kualitas akuntabilitas keuangan. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, waktu dan lokasi penelitian. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap beberapa vaiabel yang menjadi penelitian penulis.

Perbedaan waktu dan lokasi penelitian akan berpengaruh terhadap analisis deskriptif mengenai bagaimana implementasi SIKD, SPIP, Kualitas Laporan keuangan dan akuntabilitas publik di lokasi penelitian dilakukan yaitu pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung. Perbedaan lokasi ini juga berpengaruh terhadap salah satu variabel yang diteliti oleh penulis yaitu kualitas laporan keuangan. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan pada provinsi jawa tengah dimana kualitas laporan keuangan provinsi jawa tengah mendapatkan opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), sedangkan kabupaten Bandung yang menjadi lokasi penelitian penulis mendapatkan opini WDP (wajar Dengan Pengecualian). (IHPS 1 2015, www.bpk.go.id)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “**Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Publik (Survei Pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung).**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan keuangan pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana Akuntabilitas Publik pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem pengendalian internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal Pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntablilitas Publik Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal Pemerintah secara simultan terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.
   1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis kemudian ditarik kesimpulan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan serta dampaknya terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas Laporan keuangan pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Akuntabilitas publik pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal Pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik Dinas-dinas Kabupaten Bandung.
9. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal Pemerintah secara simultan terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.
   1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literature-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan.
   * 1. **Kegunaan Praktis**
3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetauan serta memberikan gambaran tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya tentang seberapa besar implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan serta dampaknya terhadap akuntabilitas pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung).

1. Bagi Instansi

Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi akuntansi.

1. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 14 (empat belas) dinas yang terdapat di Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang-Bandung Km. 17 Bandung dan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

1. **Kajian Pustaka**
   1. **Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

1. **Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah timbul karena adanya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi. Pada umumnya fungsi-fungsi yang bersifat nasional berada di tangan pemerintah pusat termasuk di dalamnya antara lain fungsi pertahanan dan keamanan, moneter, pengendalian, perdagangan luar negeri dan hubungan luar negeri. Fungsi-fungsi yang bersifat lokal biasanya diserahkan kepada daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan prasarana lingkungan pemukiman, pembangunan dan lain-lain

Menurut Abdul Halim (2007:42) definisi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010 mengenai “Sistem Informasi Keuangan Daerah”mengatakan:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta berupa hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Tiap Daerah di wajibkan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi yang disampaikan dibuat dalam bentuk Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP yang berlaku. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip kualitas kualitatif laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri mencakup:

* 1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  2. neraca daerah;
  3. laporan arus kas;
  4. catatan atas laporan keuangan daerah;
  5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
  6. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
  7. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Bentuk dan format laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang di tetapkan dapam PP No. 71 tahun 2010 dan kebijakan yang telah ditetapkan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dilakukan secara berkala tiap periode secara tepat waktu. Periode pelporan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

* 1. paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
  2. paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
  3. paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dan Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

1. **Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007:60) Laporan akuntansi keuangan daerah dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah yang akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *stake holder* yang meliputi:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah
2. BPK (Badan Pengawas Keuangan) adalah badan yang melakukan pengawasan atau pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Investor, Kreditor, dan Donatur badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya naik dari dalam negerin maupun luar negeri yang meyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah
4. Analisis ekonomi dan pemerhati daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atau aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah
5. Rakyat adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintahan khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah
6. Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah ( Pasal 2 PP No. 108 Tahun 2000)
7. Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman (penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf e peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah)
8. **Pengertian Sistem informasi Keuangan daerah**

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

1. **Komponen Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen yang fungsinya sangat penting di dalam sistem informasi. Dalam PP no 56 2005 menyatakan bahwa komponen sistem informasi keuangan daerah mengikuti aturan yang berlaku umum. Sedangkan menurut Azhar Susanto (2009:139) komponen sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*Hardware*)
2. Perangakat lunak (*Software*)
3. Manusia (B*rainware*)
4. Prosedur (*Procedur*)
5. Basis data (*Database*)
6. Jaringan komunikasi (C*ommunication network*)

Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*Hardware*)

Hardware merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Perlu diketahui bahwa *hardware* tidak menentukan tapi membantu jalannya sistem informasi akuntansi. Bagian–bagian hardware terdiri atas:

1. Bagian Input (*Input device*)

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam komputer seperti, *keyboard, mouse,* *scanner,* dll. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja jika ada *driver (hardware* dan *software)* yang bentuknya terpisah atau *built* *in* dalam *motherboard*

1. Bagian Pengolahan Utama dan Memori

CPU (*Central Prossesing Unit*) yang selama ini mungkin kita kenal adalah merupakan rumah atau (*box*) dari komponen-komponen lainnya, seperti:

1. *Processor* (Otak computer)
2. *Memory*
3. *Motherboard*
4. *Hardisk*
5. *Floppy disk*
6. *CD ROM*
7. *Expansion slot*
8. *Devices controller (Multi I/O, VGA card, Sound card)*
9. Komponen lainnya *(fan, baterai, conector, dll)*
10. *Power Supply*
11. Bagian Output ( *Output Device* )

Peralatan Output merupakan peralatan – peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Beberapa macam peralatan output yang sering digunakan seperti : *printer,* layar monitor*, speaker LCD*, dll.

1. Bagian Komunikasi

Peralatan komunikasi adalah peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Seperti, *Network card* untuk LAN, *wireless* LAN, dan lain-lain.

1. Perangkat lunak (*Software*)

Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Tanpa adanya *software* komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Bagi sebagian orang *software-software* tersebut jelas fungsinya, tapi bagi sebagian yang lainnya terutama bagi mereka yang baru mendalami masalah komputer, keberadaan *software-software* tersebut cukup membingungkan. Hal penting yang perlu di ingat adalah *software* bukan merupakan sistem informasi, *software* hanya merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi. Pengelompokan *software* meliputi :

1. *Operating system* (sistem operasi)

Berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam Komputer. Misalnya antara *keyboard* dengan CPU, Layar monitor, dan lain-lain. Contohnya: Microsoft Windows, Linux, dll. Sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah sistem operasi yang dibuat oleh *Microsoft* dengan nama *microsoft windows.*

1. *Interpreter dan compiller*
2. *Interpreter* merupakan *software* yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti manusia kedalam bahasa komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Contoh: *Microsoft access, Oracle, Pascal*, dll.
3. *Complier* (komplier) untuk menterjemahkan bahasa manusia kedalam bahasa komputer secara langsung satu *file*.
4. Perangkat lunak aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut ‘paket aplikasi’ merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan. *Software* ini dibuat perusahaan perangkat lunak tertentu (*Software House*) baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika Serikat. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum karena itu sangatlah wajar jika *software-software* ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer.

1. Manusia(*Brainware*)

Sejalan dengan persepsi kita bahwa *brainware* Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang selama ini dikenal sebagai SIA. *Brainware* dikelompokan sebagai berikut:

1. Pemilik sistem informasi

Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya disamping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi.

1. Pemakai sistem informasi

Para pemakai akhir sistem informasi biasanya kurang begitu perhatian dengan biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pemilik sistem informasi. Perhatian utama dari pemakai akhir sistem informasi tersebut adalah bagaimana agar sistem informasi dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Mereka biasanya menaruh perhatian terhadap kebutuhan bisnis apa yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Pemakai akhir sistem informasi juga sangat memperhatikan masalah teknologi yang digunakan.

1. Prosedur (*Procedure*)
2. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulan-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur yang benar, sistem informasi sehebat apapun akan menghadapi resiko tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Prosedur penting dimiliki suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

1. Aktivitas

Pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut, karena itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi, sedangkan aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar berjalan dengan baik.

1. Fungsi

Fungsi merupakan kumpulan aktivitas yang mendukung operasi bisnis suatu organisasi. Mereka biasanya meliputi beberapa aktivitas berbeda yang saling membantu untuk hal-hal yang sifatnya lebih umum.**28**

1. Basis Data (*Database*)

Sistem *database* merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan.

1. Media dan Sistem penyimpanan data

Media dan sistem penyimpanan data terdiri dari dua :

1. Media penyimpanan data berurutan – melalui media ini *record-record* data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Sebagai contoh adalah pita magnetic (*magnetic tape*).
2. Media penyimpanan secara langsung – memungkinkan pemakai (*user*) membaca data dalam urutan yang dibutuhkan tanpa perlu memperhatikan urutan penyusunan secara *physic* dari media penyimpanan data tersebut.
3. Sistem Pengolahan

Ada dua cara pengolahan data yaitu :

1. Pengolahan secara *Batch* (mengumpulkan terlebih dahulu)
2. Pengolahan secara *On-line*
3. Organisasi *Database*
4. Organisasi data pada *database* tradisional

Memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Tapi ada beberapa kelemahan dalam sistem ini seperti:

1. Data rangkap dan tidak konsisten
2. Kesulitan mengakses data
3. Data terisolasi
4. Data sulit diakses secara bersamaan
5. Masalah keamanan data
6. Masalah integritas
7. Organisasi *database* modern

Memberikan banyak keuntungan bagi implementasi Sistem Informasi Akuntansi.

1. Model-Model Data.

Secara umum model data terbagi dalam beberapa model yaitu :

1. Model hierarki – model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan tingkatnya.
2. Model *network* – model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepentingannya.
3. Model relasi – model data yang disusun berdasarkan pada hubungan antar dua entitas/organisasi.
4. Jaringan komunikasi (C*ommunication network*)
5. Perkembangan teknologi jaringan komunikasi
6. Penggabungan computer dan komunikasi
7. Jaringan informasi *superhighway*
8. Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi
9. Topologi jaringan telekomunikasi**30**

Ada empat topologi jaringan yang digunakan yaitu:

1. *Star network*
2. *Bus network*
3. *Ring network*
4. *Hibryd network*
5. Jaringan berdasarkan Geografi
6. LAN (*Local Area Network*)

Merupakan jaringan yang ada pada lokasi tertentu misalnya suatu ruang atau suatu gedung.

1. WAN (*Wide Area Network*)

Merupakan jaringan yang tersebar ke beberapa lokasi. Atau bisa juga di bilang WAN adalah kumpulan dari beberapa LAN yang terhubung secara *On-line* melalui internet.

1. Penggunaan Telekomunikasi
2. Surat elektronik ( *elektronik mail*)
3. Surat suara (*voice mail*)
4. Mesin fax
5. Layanan informasi digital
6. *Teleconferencing, data conferencing* dan *video converencing*
7. Perpindahan data secara elektronik

Perangkat untuk kerja berkelompok (*groupware)*

1. **Prinsip Informasi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Prinsip informasi keuangan daerah yang tersedia harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Akurasi
2. Sederhana
3. Mudah dimengerti
4. Relevan
5. Komparabilitas
6. Dapat dipertanggungjawabkan,

Dari keenam prinsip tersebut, dapat terwujudnya transparansi informasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak yang memakainya.

1. **Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007:67) akuntansi mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. “Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi
2. Informasi yang dihasilkan akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan”.

Dari kedua fungsi tersebut bahwa akuntansi harus menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi merupakan keputusan yang terkait dengan ilmu ekonomi dan tidak terbatas pada keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Dalam Mardiasmo (2009:56) adapun tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

1. “Menyediakan informasi keuangan keperluan pengambilan keputusan
2. Menyajikan informasi untuk evaluasi kinerja”.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang di tetapkan dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.65 tahun 2010 yang sebelumnya merupakan PP no. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah di selenggarakan oleh menteri keuangan dan di serahkan pelaksanaannya kepada masing- masing daerah. Penyelenggaraan SIKD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah;
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat ;
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

* 1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
  2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
  3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian deficit anggaran; dan
  4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Penyelenggaraan SIKD mempunyai tujuan bagi terselenggara nya pemerintah daerah antara lain :

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
5. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
6. Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Penyelenggaraan SIKD pemerintah daerah diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Situs resmi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat diselenggarakan oleh masing–masing Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, danpelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmiPemerintah Daerah.
3. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangkamendukung SIKD secara nasional
   1. **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**
4. **Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Istilah pengendalian pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris sekitar tahun 1600 dan didefinisikan sebagai “salinan dari sebuah putaran (untuk akun), yang kualitas dan isinya sama dengan aslinya. Samuel Johnson dalam Amin Widjaja Tunggal (2013) menyimpulkan pengertian awal ini sebagai “daftar atau akun yang dipegang oleh seorang pegawai, yang masing-masing dapat diperiksa oleh pegawai lain.” Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern (Sukrisno Agoes, 2012:100).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Pengertian SPIP tersebut mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Adapun penjelasan mengenai hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

* + 1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan Instansi Pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.

* + 1. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

* + 1. Pengamanan asset

Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

* + 1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilan tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

1. **Komponen Pengendalian Intern dan Fungsi Pengendalian Intern**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP disebutkan Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang berhubungan, yaitu:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 4 yang menjelaskan mengenai lingkungan pengendalian menjelaskan bahwa:

“Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

* 1. penegakan integritas dan nilai etika;
  2. komitmen terhadap kompetensi;
  3. kepemimpinan yang kondusif;
  4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
  8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait”.

1. Penilaian risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 13 mengenai penilaian risiko menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risikoyang terdiri atas:

* 1. “Identifikasi risiko;
  2. Analisis risiko”.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Identifikasi Risiko.

Menurut PP no 60 2008 tentang Ssitem Pengendalian internal Pemerintah, identifikasi risiko sekurang-kurangnyadilaksanakan dengan:

* menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
* menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan factor internal; dan
* menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
  1. Analisis Risiko

Menurut PP No 60 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pemerintah, Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

1. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta risiko yang dihadapi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 18 mengenai kegiatan pengendalian menyatakan bahwa kegitan pengendalian memiliki kerakteristik sebagai berikut:

* + - * 1. “kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
        2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
        3. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
        4. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
        5. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
        6. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan”.

Dalam peraturan perundan-undangan Nomor 60 tahun 2008 juga dijelaskan bahwasannya kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. “reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting”.
12. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam Sistem Pengendalian Intern seperti juga hubungan kerja antar individu. Mereka harus memiliki alat yang menyebarluaskan informasi penting.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 42 menegenai informasi dan komunikasi menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya harus memenuhi hal berikut:

* + - * 1. “Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
        2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus”.

1. *Monitoring*/Pemantauan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

pemantauan berkelanjutan

evaluasi terpisah

tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Adapun penjelasan mengensai hal tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

* 1. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

* 1. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

1. **Prinsip Umum Penyelengaraan SPIP di Indonesia dan di Beberapa Negara**

Istilah pengendalian internal baru dipergunakan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, belum dibahas secara mendetail tentang tata cara pelaksanaan pengendalian internal. Perkembangan pengendalian intern di Indonesia mulai ditandai dengan terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya PP No 60 Tahun 2008 ini merupakan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Inti dari PP No 60 tahun 2008 adalah menciptakan suatu Sistem Pengendalian Intern yang dapat mewujudkan praktik *good governance* dalam pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan, PP 60 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini disebabkan Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan saja, tetapi juga menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Konsep dasar pengendalian memandang bahwa Sistem Pengendalian Intern bukan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi sesaat dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan akan dicapai. Konsep ini memberikan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan SPIP yaitu:

1. “Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus
2. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia
3. Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak
4. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah”.

Untuk lebih mengetahui mengenai prinsip umum tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

* + - 1. Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus

Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah ”*built-in”*. Pengertian *built-in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

* + - 1. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia

Efektivitas Sistem Pengendalian Inten sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern secara efektif.

* + - 1. Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak

Betapapun baiknya perancangan dan pengoperasian Sistem Pengendalian Intern dalam suatu instansi, tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai. Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam seluruh Sistem Pengendalian Intern, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi.

* + - 1. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta sesuai dengan kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain.

Menurut Wibisono (2010: 85) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain:

1. “Sumber daya Manusia.
2. Komitmen
3. Ketersediaan Infrastruktur
4. Keteladanan dari Pimpinan”.

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia.

Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika. Sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan mentaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya.

1. Komitmen

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Usman, 2010). Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

1. Keteladanan dari Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin.

1. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu Instansi Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dari infrastruktur SPIP tersebut.

Sedangkan perkembangan Sistem Pengendalian Intern di beberapa negara telah berkembang dengan pesat dan mapan yang terbukti menjadi suatu perangkat yang efektif untuk pengendalian internal pemerintah.

Di negara China, perkembangan audit internal perusahaan didorong oleh meningkatnya pertumbuhan makroekonomi bersama dengan penerapan kebijakan administratif pemerintah (Jou, 1997). Audit internal diakui sebagai salah satu fungsi penting dari pengendalian internal dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya, unit audit internal pada perusahaan milik pemerintah memiliki hubungan yang dekat dengan badan peraturan pemerintah. Standar no 29 pada *National Auditing Law* mengatur tentang tata cara pembentukan unit audit internal pada perusahaan milik pemerintah yang harus dipandu dan diawasi oleh pemerintah lokal yang pengawasannya dari pemimpin departemen mereka sendiri maupun dari pemerintah dalam hal ini diwakili departemen audit Negara.

Salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu New York juga memilki perkembangan yang pesat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Komponen Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan juga telah berkembang yang dilengkapi dengan aktivitas pendukung lainnya seperti evaluasi, rencana strategis dan audit internal.

Revisi *Standards For Internal Control In New York state Government* di tahun 2005 menyatakan bahwa pengendalian internal bukan hanya satu set prosedur yang ditujukan untuk pengamanan aset, tapi lebih jauh memiliki fungsi dalam mengidentifikasi, memonitor dan manajemen risiko (sumber: www.osc.state.ny.us).

* + 1. **Kualitas Laporan Keuangan**

1. **Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna Pengguna dapat menerima informasi yang disajikan harus mengacu pada standar yang berlaku serta memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas.Kualitas dikemukakan oleh Goetsch & Davis dalam Hessel Nogi S Tangkilisan (2007:209), sebagai berikut:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Zaki Baridwan (2010:4) menyatakan informasi dapat dikatakan berkualitas bila memenuhi beberapa karakteristik, sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama,yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten”.

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

Laporan keuangan perusahaan akan menunjukan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu meminimalkan resiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Ada beberapa definisi dari Laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerrintahan. Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan yang menunjukan kondsi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Kasmir (2012:45) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun keukuatan guna mengambil keputusan ekonomi.

Nordiawan dkk, 2012 menyatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dandapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

1. **Fungsi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang disusun digunakan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi guna mencapai tujuan entitas.

Menurut Susan Irawati (2008:145) Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

1. **Tujuan Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari *conseptuual framework* IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12) dikutip dari Wahyuni (2013)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisai anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna pagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bemanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

(a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah

(b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah

(c) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasi nya penggunaan sumber daya ekonomi

(d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya

(f) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.

(g) Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggsaraan kegiatan pemerintahan

(h) Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendandai aktvitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna.

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:30), tujuan laporan keuangan dimulai dari yang paling umum, kemudian bergerak ke tujuan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan
2. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas untuk Pemakai Eksternal

3. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas Perusahaan.

Adapun penjelasan mengenai ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Informasi yang Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan

Tujuan yang paling umum adalah bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditor, dan pemakai lainnya, saat ini maupun potensial (masa mendatang), untuk pembuatan keputusan investasi, kredit, dan investasi semacam lainnya.

* + 1. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas untuk Pemakai Eksternal

Tujuan kedua ini menyatakan laporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (yang berarti risiko) penerimaan kas yang berkaitan. Tujuan ini penting, karena investor atau pemakai eksternal mengeluarkan kas untuk memperoleh aliran kas masuk. Pemakai eksternal harus yakin bahwa ia akan memperoleh aliran kas masuk yang lebih dari aliran kas keluar. Pemakai eksternal harus memperoleh aliran kas masuk bukan hanya yang bisa mengembalikan aliran kas keluar (*return on investment*), tetapi juga aliran kas masuk yang bisa mengembalikan return yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya. Laporan keuangan diperlukan untuk membantu menganalisis jumlah dan saat/waktu Penerimaan kas (yaitu dividen, bunga) dan juga memperkirakan risiko yang berkaitan.

* + 1. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas Perusahaan.

Penerimaan kas pihak eksternal akan ditentukan oleh aliran kas masuk perusahaan. Perusahaan yang kesulitan kas akan mengalami kesulitan untuk memberi kas ke pihak eksternal, dan dengan demikian Penerimaan kas pihak eksternal akan terpengaruh.

1. **Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing – masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang di tentukan oleh perundang undangan. PP No.24 tahun 2005 paragraf 14 kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah menurut PP no. 71 Tahun 2010 sehingga terdapat beberapa penambahan komponen laporan keuangan pemerintah yang dikutip oleh Abdul Halim dan Syam Kusufi (2013:267) menyatakan terdapat empat komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realisai Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)

Urain mengenai kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatanRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

i. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

ii. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;

iii. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)* sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.
4. **Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan PemerintahNo. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristikberikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami”

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

a. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).* Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).* Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap formasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas ada kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjuk kan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

1. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Selain kedua variabel yang sedang diteliti oleh penulis pada penelitian ini, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan data keuangan oleh para ahli yang kompeten dan independen. Menurut Gondodiyoto (2007:35), audit laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pemeriksaan oleh orang-orang yang mampu (kompeten) dan independen, dengan menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dan keterangan yang terukur suatu kesatuan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan terukur yang diperoleh dari pemeriksaannya tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Audit laporan keuangan dapat mengurangi resiko informasi, yaitu resiko bahwa informasi yang digunakan oleh investor, kreditor, dan pihak lain untuk menilai resiko usaha tidak akurat. Audit keuangan akan memberikan keyakinan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan (dapat mengurangi resiko informasi), dan karena itu resiko secara keseluruhan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan dengan data atau laporan keuangan yang telah diaudit dapat diantisipasi lebih baik.

Dari hasil audit diperoleh suatu temuan audit, baik temuan yang positif maupun negatif. Temuan negatif menuntut auditor untuk menyimpulkan bahwa prosedur-prosedur harus diperbaiki dan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh auditor tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corportae Governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja. Menurut Sri Sulistyanto (2008:134), *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholdernya.”

Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Semua pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fairness*) secara akurat dan tepat waktu. Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparency*).

* + 1. **Akuntabilitas Publik**
       1. **Pengertian Akuntabilitas Publik**

Akntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability,* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas (*accountability)* Menurut (Suherman 2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Definisi akuntabilitas publik Menurut Mardiasmo (2002:20) yaitu sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihakpemberi amanah (*principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Pengertian akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum MD (2004:31) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya”.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah, Peraturan No.24 Tahun 2005 tentang SAP:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance.* Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

* + - 1. **Jenis-jenis akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. “Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*, dan
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)”.

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

1. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

* + 1. “Akuntabilitas keuangan,
    2. Akuntabilitas manfaat
    3. Akuntabilitas prosedural.

Adapun penjelasan mengenai tiga macam akuntabilitas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan,

akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan.

1. Akuntabilitas manfaat

akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

1. Akuntabilitas prosedural

merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

* + - 1. **Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut menurut Hopwood dan Tomkins, 1984;Elwood, 1993 dalam Mardiasmo (2009:21-23) antara lain adalah sebagaiberikut:

1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan”

Adapun penjelasan mengenai aspek atau dimensi dari akuntabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabillitas kejujuran berarti penyajian informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik (Pristwanto seperti dikutip Nurkholis, 2005:12).

*“Accountability for probity is concorned with the avoidance of malfeasance. It ensures that fund used properly and in the manner authorised. Accounting for legality is concerned with ensuring that the powers given by the law are not exceeded”.*

Akuntabilitas hukum menghendaki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam mengoperasikan organisasi sektor publik. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya hukum. Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

1. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Akuntabilitas manajerial juga berhubungan dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisien dan ketidakefektivan organisasi.

1. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

1. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Mardiasmo (2006:5) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manejemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.
   * 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti/Tahun** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** |
| 1 | Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng). | Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | * Dalam penelitian tersebut variabel independen yang digunakan berbeda dengan yang digunakan penulis. * Objek dan Tempat penelitian berbeda. * Penulis menyajikan variabel intervening. |
| 2 | Miftahul Fikri (2011) | pengaruh SIKD dan pengawasan keuangan daerah terhadapkualitas laporan keuangan (studi empiris pada SKPD Pemerintah kota padang) | Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. | * Dalams Penelitian tersebut tidak terdapat variabel intervening yang penulis gunakan. * Tempat penelitian dilakukan di tempat berbeda. |
| 3 | Aristanti Widyaningsih, Alvian TriantoroLili, Sugeng Wiyantoro (2011) | Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran Di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa tengah) | Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan pemrintah daerah | * penelitian penulis merupakan replikasi dari penelitian tersebut dengan mengubah hubungan antar variabel menjadi pengaruh * Tempat penelitian dilakukan di tempat berbeda. |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakterisitk kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

* + 1. **Pengaruh Sistem Informasi keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.**

Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012:43) didefinisikan sebagai berikut: “proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi daerah adalah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Menurut mardiasmo (2004:35)

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik”.

Menurut Sonny Loho & Sugiyanto (2004:54), ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, pada sistem akuntansi pemerintah diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010, Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/ walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah adalah:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setiap sistem keuangan pemerintah daerah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut secara periodik yang meliputi;

* 1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas
  2. Neraca Satuan Kerja Perangkat Dinas
  3. Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Dinas

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Dinas, sedangkan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dilaksanakann oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian dari kualitas laporan keuangan daerah adalah: “ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Berdasarkan teori tersebut menerangkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah suatu tolok ukur dari pelaporan informasi akuntansi yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan awal yang diinginkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

informasi keuangan daerahnya mengacu pada suatu sistem pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan output yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh berbagai kalangan dan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hal tersebut di atas didukung dengan hasil penelitian Nurhayati (2004) menunjukkan adanya pengaruh yang besar penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Herawati (2014), Mailani (2013), Miftahul Fikri (2011) dan Aristanti Widyaningsih (2011) juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

* + 1. **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu pemegang kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2007), untuk melindungi para pengguna laporan keuangan, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor independen dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Weygandt et all (2005) dalam Tuti Herawati (2014) mengungkapkan bahwa:

“Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Agar suatu laporan keuangan dapat memberikan keyakinan kepada penggunannya dan dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan adanya pernyataan kualitas atas laporan keuangan (opini) yang diberikan oleh auditor ekstern. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945, yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 55 ayat (4) menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya, pasal 58 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut juga menyatakan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggaran Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.

Dalam suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif diperlukan adanya fungsi internal audit yang berperan sebagai “mata dan telinga” dari pimpinan tertinggi organisasi. Secara berkala, internal auditor akan menyampaikan laporan hasil audit yang berisi rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemui dalam pemeriksaan. Laporan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2002 menunjukkan bahwa pengendalian intern yang kuat merupakan faktor yang paling efektif dalam upaya mengatasi korupsi dibandingkan dengan kamera pengintai (surveillance camera) sebagai faktor yang paling kurang efektif (Indreswari, 2010).

Keberhasilan penerapan SPIP pada suatu daerah tidak terlepas dari kesamaan persepsi dan dukungan dari seluruh jajaran yang dilingkungannya untuk berkomitmen menerapkan unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur yang termuat di dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah diharapkan sudah memahami tahapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mensukseskan penerapan SPIP di daerahnya.

Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Menurut Siti dan Ely (2010) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut:

1. keandalan pelaporan keuangan,
2. menjaga kekayaan dan catatan organisasi
3. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan,
4. efektivitas dan efisiensi operasi.”

Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.

Hayyuning Tyas Rosdiani (2011) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hal itu karena dengan pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Sedangkan menurut hasil penelitian Rieska Widiani (2013) juga menunjukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan olehAtikah Fathinah Putri (2014), Mailani (2013), Miftahul Fikri (2011), Ni Luh Nyoman dkk (2014), Aristanti Widyaningsih (2011) juga menunjukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

* + 1. **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik**

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (2000: 11) adalah akuntabilitas, manajerial , transparansi. Adapun penjelasan mengenai ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;

1. Manajerial

informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

1. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum (2008:19) bahwa adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas yaitu:

“Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor publik dan Pengawasan terhadap Kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.”

Selanjutnya menurut PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah pula dikemukakan tujuan pelaporan keuangan, yaitu bahwa pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dengan cara:

1. Penyediaan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Penyediaan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan.
3. Penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah diantaranya yaitu penelitian Nurulqisthi (2011) dengan judul pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerahpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada 28 SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Inspektorat Kota Bandung.Analisis Statistik yang digunakan adalah analisis regresi dan uji t statistik dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian lain yakni penelitian Dodi lumentut (2015) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah.

* + 1. **Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian internal pemerintah erat kaitannya dengan kebijakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Sistem pengendalian intern akan efektif jika didukung oleh pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Mulyadi (2001:19) menyatakan:

“tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern,yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyesdiakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaane perusahaan.”

Penelitian mengenai variabel yang sama dilakukan oleh Sutrisno parintak (2015) dan Aristanti Widyaningsih (2011)yang menyatakan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh simultan dari sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualita laporan keuangan.

* + 1. **Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Melalui Kualitas Laporan Keuangan.**

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara agent dan principal. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan yang diberikan oleh pihak pemilik (*principal)* kepada pihak perusahaan atau organisasi (*agent*).

*Agency Theory* menjadi kerangka pikir akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau perhitungan (*reckoning*) yang diperlukan dari sebuah tindakan yang menjadi tanggung jawab organisasi (Gray et al., 1996). Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002).

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa organisasi telah mematuhi semua undang-undang dan standar etika; mematuhi misi organisasi, etika, personil dan kebijakan akuntansi, melindungi hak-hak anggota, menyusun dan mengajukan laporan keuangan tahunannya sesuai peraturan dan membuat laporan tersedia untuk semua anggota dewan dan setiap anggota masyarakat yang memintanya. Pengembangan dan pemeliharaan pengendalian internal organisasi akan membantu keandalan laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas (Andrew Cuomo, 2005).

Ide dasar dari pengendalian dalam sektor publik adalah untuk memastikan bahwa sebuah organisasi beroperasi dalam tanggung jawab hukum dan kebijakan serta mencapai tujuan yang ditetapkan untuk itu. Sistem pengendalian menyediakan jaminan bahwa sistem manajemen beroperasi dengan baik. Selanjutnya pengendalian dan akuntabilitas yang dilakukan merupakan suatu mekanisme yang berinteraksi satu sama lain (OECD, 2005).

Kegiatan pengendalian dalam sebuah organisasi pada dasarnya terdiri dari penilaian kinerja (membandingkan kinerja aktual dengan anggaran , prakiraan dan kinerja periode sebelumnya) , pengolahan informasi (yang diperlukan untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan otorisasi transaksi), kontrol fisik (yang diperlukan untuk memberikan keamanan di kedua catatan dan lain aset) , dan pemisahan tugas (di mana tidak ada satu orang harus menangani semua aspek transaksi dari awal sampai akhir).

menurut Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (2000: 24) menyatakan bahwa

”sistem informasi yang terapkan akan menentukan bagaiman laporan keuangan dihasilkan, dan tujuan pelaporan keuangan adalah untuk akuntabilitas, manajerial , transparansi.”

Penelitian mengenai pengeruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas dilakukan oleh Aristanti Widyaningsih dan Alvian Triantoro (2011), dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas melalui kualitas laporan keuangan sebesar 34% hal yang sama didapatkan dari pengendalian internal dimana pengaruh terhadap akuntabilitas yang melalui kualitas laporan keuangan adalah 32%.

* + 1. **Bagan Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel efektivitas sistem informasi keuangan daerah, dan pengeandalian internal pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah serta dampanya terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

* Adanya jaminan kepatuhan

1. Akuntabilitas Manajerial

* Pengelolaan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1. Akuntabilitas program.

* Ketercapaian tujuab yang diterapkan dalam program.

1. Akuntabilitas kebijakan.

* Tujuan dibuat kebijakan

Sumber Elwood 1993 dalam mardiasmo (2009 21-23)

**Akuntabilitas keuangan**

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Sumber: PP no 71 tahun 2010

**Kualitas Laporan Keuangan**

1. *Hardware*

(perangkat keras)

1. *Software*

(perangkat lunak)

1. Manusia (*brainware*)
2. Prosedur (*procedure*)
3. Basis data (*database*)
4. Jaringan Komunikasi

(*communication network*)

Sumber: Azhar Susanto (2013)

**Sistem Informasi Keuangan Daerah**

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Resiko.
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi.
5. Pemantauan Pengendalian Internal.

Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008

**Sistem Pengendalian Internal**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 2: sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 3: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis 4: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik pemerintah.

Hipotesis 5: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

**BAB III**

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

**3.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

**3.1.1 Objek Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Pemerintah yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan dampaknya pada Akuntabilitas Publik*.* Adapun perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Dinas-dinas Kab. Bandung yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang Kab. Bandung, Indonesia.

**3.1.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Menurut Sugiyono (2015:2) metode penelitian adalah:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015:8):

“Metode penelitian kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

**3.1.3 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Menurut Moh. Nazir (2011:54) pengertian dari metode deskriptif adalah:

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Di dalam penelitian ini metode deskriptif menjelaskan tentang Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan serta Akuntabilitas Publik. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Sedangkan metode verifikatif menurut Moh. Nazir (2011:91) adalah:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima”.

Metode verifikatif, yaitu hubungan antara Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan serta Akuntabilitas Publik.

**3.1.4 Model Penelitian**

Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang sedang diteliti dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yaitu: “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas Publik.”

Adapun model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kualitas Laporan Keuangan

(Y)

Akuntabilitas Publik

(Z)

Implementasi SIKD

(X1)

SPIP

(X2)

**Gambar 3.1**

**Model Penelitian**

**3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Variabel-variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan pengertian yang berarti ganda. Definisi variabel juga memberikan batasan sejauh mana penelitian yang akan dilakukan. Operasional variabel diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait.

**3.2.1 Definisi Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel memiliki pengertian sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dengan satu variabel dependen (terikat) dan satu variablel *intervening*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2015:39):

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (*X*) adalah Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian internal Pemerintah. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

Sedangkan Pengertian pengendalian Internal pemerintah menurut Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Sebagai berikut:

"SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2015:39):

“Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (*Z*) adalah Akuntabilitas Publik. Pengertian akuntabilitas publik Menurut Mardiasmo (2002:20) adalah sebagai berikut:

”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

3. Variabel *Intervening*

Menurut Sugiyono (2015:39):

“Variabel i*ntervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen”.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *intervening* (*Y*) adalah Kualitas Laporan Keuangan. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan menurut Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

**3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian terdapat empat operasional variabel, yaitu variabel *X1* (Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah), variabel *X2* (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), variabel *Y* (Kualitas Laporan Keuangan) dan variabel *Z* (akuntabilitas Publik).

Agar lebih jelas untuk mengetahui variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel Independen**

**(X1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** | **Item** |
| Sistem Informasi Keuangan Daerah (**X1**) | Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.  Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. | Perangkat keras (*Hardware*) | * *Input device* * Bagian pengolahan utama dan memori *device* * *Output device* * Komunikasi *device* | Ordinal | 1-5 |
| Perangkat lunak (*Software*) | * Sistem operasi * Perangkat lunak aplikasi | Ordinal | 6-9 |
| Manusia (B*rainware*) | * Sumber Daya Manusia | Ordinal | 10-13 |
| Prosedur (*Procedure*) | * Prosedur * Aktivitas * Fungsi | Ordinal | 14-16 |
| Basis data (*Database*) | * Media penyimpanan * Sistem pengolahan * Organisasi data | Ordinal | 17-20 |
| Jaringan komunikasi (C*ommunication network*) | * LAN * WAN | Ordinal | 21-23 |
| **Sumber: Azhar Susanto (2009:139)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tabel 3.2**  **Operasionalisasi Variabel Independen**  **X2** | | | |  |
| **Variabel** | **Konsep** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** | **No Item** |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x2) | SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008 | Lingkungan Pengendalian | * Penegakan Integritas dan nilai etika * Komitmen terhadap kompetensi. * Kepemimpinan yang kondusif * Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. * Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. * Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM * Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif. * Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait. | Ordinal | 1-12 |
| Penilaian Risiko | * Identifikasi Risiko * Analisis Risiko | Ordinal | 13-16 |
| Aktivitas Pengendalian | * Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkuaan * Pembinaan SDM * Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi * Pengendalian fisik atas aset * Penetapan reviu atas indicator dan ukuran kinerja * Pemisahan fungsi * Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting * Pencatatan yang akurat dan tepat waktu dan transaksi atas kejadian. * Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. * Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. * Dokumentasi yang baik atas Sistem pengendalian internalserta transaksi dan kejadian penting | Ordinal | 17-29 |
| Informasi dan Komunikasi | * Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi * mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. | Ordinal | 30-34 |
|  | Pemantauan | * Pemantauan berkelanjutan * Evaluasi terpisah * Tindak lanjut rekomendasi hasil audit. | Ordinal | 35-37 |

**Tabel 3.3**

**Operasionalisasi Variabel Intervening**

**(Y)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep** | **Dimensi** | | **Indikator** | **Skala** | **No Item** |
| Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) | Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”  Sumber: SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan | Relevan | | * Memiliki manfaat umpan balik * Memiliki manfaat prediktif * Tepat Waktu * Lengkap | Ordinal | 1-8 |
| Andal | | * Penyajian jujur * Dapat Diverivikasi * Netralitas | Ordinal | 9-16 |
| Dapat  Dibandingkan | | * Sebagai pengukuran kinerja Instansi antara selama periode berjalan dengan periode sebelumnya * Dapat dijadikan acuan dalam membandingkan kinerja dengan Institusi pemerintah lainnya. | Ordinal | 17-28 |
| Dapat dipahami | | * Informasi dapat dipahami oleh pengguna * Informasi disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna |  | 19-21 |
|  | **Tabel 3.4**  **Operasionalisasi Variabel Dependen**  **(Z)** | | | | |  |
| **Variabel** | **Konsep** | **Dimensi** | **Indikator** | | **Skala** | **No Item** |
| Akuntabilitas Publik (Z) | Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut  Sumber: Mardiasmo (2006:5) | Akuntbilitas atas hukum dan kejujuran | * Penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan. * Adanya jaminan kepatuhan hukum. * Pelaporan informasi dan kegiatan sesuai dengan kenyataan yang ada. * Penegakan hukum dalam instansi pemerintah apabila terjadi kesalahan | | Ordinal | 1-5 |
| Akuntabilitas Manajerial | * Pengelolaan kegiatan oleh organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien. * pertanggung jawaban kinerja/proses organisasi | | Ordinal | 6-10 |
| Akuntabilitas Program | * Ketercapaian tujuan yang diterapkan dalam program. * Efektivitas program dalam menghasilkan *outcome* (hasil) * Pertanggungjawaban program sampai pada pelaksanaan program | | Ordinal | 11-14 |
| Akuntabilitas kebijakan  Sumber mardiasmo (2009:21-23) | * Tujuan dibuat kebijakan. * Manfaat dibuat kebijakan. * Pertimbangan kebijakan dimasa depan. | | Ordinal | 15-17 |

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternatif jawaban dalam kuesioner.

Menurut Sugiyono (2015:42)

“Macam-macam skala pengukuran dapat berupa:skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan ratio.”

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Menurut Moh. Nazir (2011:130) ukuran ordinal adalah:

“Angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan.”

Dalam operasional variabel ini untuk setiap variabel yaitu, variabel bebas maupun variabel terikat atau variabel intervening akan diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2015:43)

“Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”.

Dari setiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Untuk variabel *X1* (Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah), variabel *X2* (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), variabel *Y* (Kualitas Laporan Keuangan) dan variabel *Z* (akuntabilitas Publik).

**3.3 Populasi dan Sampel**

**3.3.1 Populasi**

Sugiyono (2015:180) mendefinisikan populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan berbeda-beda alam yang lain.

Berdasakan penelitian ini, populasi penelitiannya adalah subyek yang berhubungan dengan implementasi SIKD dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan dampaknya terhadap Akuntabilitas Publik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kabupaten Bandung yang berjumlah 14 (Empat belas). Unit observasi pengamatan pada penelitian ini adalah pegawai Dinas kabupaten Bandung khususnya pada bagian keuangan dan bagian akuntansi. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah 14 Dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 3.5**

**Populasi Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dinas** | **Divisi Keuangan** | **Divisi Akuntansi** |
| **1.** | [Dinas](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/65/title/dinas-bina-marga) Bina Marga | 5 | 2 |
| **2.** | [Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/125/title/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil) | 7 | 3 |
| **3.** | Dinas Kesehatan | 13 | 2 |
| **4.** | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 4 | 2 |
| **5.** | [Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/126/title/dinas-pemuda-olah-raga-dan-pariwisata) | 3 | 2 |
| **6.** | Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan | 9 | 11 |
| **7.** | [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/54/title/dinas-pendidikan-dan-kebudayaan) | 11 | 3 |
| **8.** | Dinas Perhubungan | 6 | 2 |
| **9.** | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 4 | 2 |
| **10.** | [Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/57/title/dinas-perumahan-tata-ruang-dan-kebersihan) | 11 | 5 |
| **11.** | [Dinas Peternakan & Perikanan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/52/title/dinas-peternakan-perikanan) | 7 | 3 |
| **12.** | Dinas Sosial | 5 | 2 |
| **13.** | [Dinas Tenaga Kerja](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/60/title/dinas-tenaga-kerja) | 7 | 3 |
| **14.** | [Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/64/title/dinas-sumber-daya-air-pertambangan-dan-energi) | 8 | 2 |
|  | Total | **100** | 44 |
|  | Total Populasi | **144** | |

* + 1. **Sampel**

Menurut Sugiyono (2014:116) definisi sampel yaitu sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif)

Menurut Arikunto (2008:116) Penentuan pengambilan Sample dapat dijabarkan sebagai berikut :

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

1. “Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan lebih baik”

Berdasarkan teori tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 50% sampel dari jumlah populasi yaitu 144 pegawai Dinas kab. Bandung pada divisi keuangan dan akuntansi. Maka diperoleh sampel dengan perhitungan sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut diatas maka diperoleh 72 sampel responden. Adapun penyebaran sampel pada divisi keuangan dan akuntansi pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Penyebaran Sampel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Dinas | Populasi | Sampel | | |
| Total | Div. Keuangan | Div Akuntansi |
| 1. | Dinas Bina Marga | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Dinas Kesehatan | 15 | 8 | 6 | 2 |
| 4. | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | [Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/126/title/dinas-pemuda-olah-raga-dan-pariwisata) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan | 20 | 10 | 4 | 6 |
| 7. | [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/54/title/dinas-pendidikan-dan-kebudayaan) | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 8. | Dinas Perhubungan | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 9. | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 10. | [Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/57/title/dinas-perumahan-tata-ruang-dan-kebersihan) | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 11. | [Dinas Peternakan & Perikanan](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/52/title/dinas-peternakan-perikanan) | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 12. | Dinas Sosial | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 13. | [Dinas Tenaga Kerja](http://www.bandungkab.go.id/page/content/type/module/id/60/title/dinas-tenaga-kerja) | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 14. | Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi | 10 | 5 | 3 | 2 |
|  | Total | 144 | 74 | 45 | 29 |

* + 1. **Teknik Sampling**

Sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, yaitu tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi) akan tetapi sebagian saja dari populasi. Sugiyono (2015:83) menyatakan bahwa:

“Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel.”

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Menurut sugiyono (2015:84) definisi *Probability Sampling* adalah sebagai berikut:

*“Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi angota sampel”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:84) definisi *Nonprobability Sampling* adalah adalah sebagai berikut:

*“Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *probability sampling* dengan jenis *Proportionate sampling.*

Menurut Prijana (2005:32),

“Teknik ini menghendaki cara pengambilan sampel dari setiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi tersebut. Cara ini dapat memberi landasan generalisasi yang lebih dapat dipertanggung jawabkan dari pada apabila tanpa memperhitungkan besar kecilna sub populasi dan setiap sub populasi.”

**3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

**3.4.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data primer. Adapun pengertian data primer adalah sebgai berikut

“Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data”.

Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan penyebaran kuesioner.

**3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, adapun teknik yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni dengan penyebaran kuesioner sehingga didapatkan data penelitian yang dapat menghasilkan kesimpuilan yang akurat. Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Interview* (Wawancara)
2. *Kuesioner* (Angket)

Adapun penjelasan mengenai pengelompokan data primer, adalah sebagai berikut:

* 1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pegumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

* 1. *Kuesioner* (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

**3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

**3.5.1 Metode Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka analisis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Disamping itu, untuk lebih memahami fenomena yang diamati, maka dilengkapi juga dengan analisis kualitatif yaitu melalui metode deskriptif, sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan serangkaian uji statistik.

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Data yang terhimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel. Menurut Sugiyono (2015:174):

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Adapun analisis data yang dilakukan penulis meliputi analisis deskriptif dan analisis asosiatif sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
2. Menganalisis Implementasi SistemInformasi Keuangan daerah.
3. Menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Menganalisis Kualitas Informasi Laporan Keuangan
5. Menganalisis Akuntabilitas Publik
6. Analisis Verifikatif
7. Menganalisis seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Publik.
8. Pada penelitian ini penulis melakukan beberapa analisis, analisis tersebut merupakan hasil dari rumusan yang ada pada Bab 1, adapun urutan analisis yang dilakukan oleh penulis, yaitu:
9. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.
10. Setelah metode pengumpulan data kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan pertanyaan atau kuesioner.
11. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari masing-masing indikator akan dijabarkan dalam sebuah daftar pernyataan (kuesioner) yang kemudian kuesioner ini dibagikan kepada bagian yang bersangkutan dengan masalah yang diuji, dimana masing-masing indikator memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai berbeda, tiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Tiap jawaban dibutuhkan skor 1 sampai dengan 5.
12. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan, dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik, untuk menilai variabel *X,* variabel *Y*, dan variabel *Z*, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Untuk menilai *X, Y*, *Z*, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus *mean* (rata-rata) yang terdapat dalam statistik untuk penelitian sebagai berikut:

**Untuk Variabel X**

**Untuk Variabel Z**

**Untuk Variabel Y**

**Sumber: Moh. Nazir (2011:383)**

Keterangan:

X = Rata-rata X

Y = Rata-rata Y

Z = Rata-rata Z

Σ = Sigma (Jumlah)

X i = Nilai X ke i sampai ke n

Y i = Nilai Y ke i sampai ke n

Z i = Nilai Z ke i sampai ke n

N = Jumlah individu

*Mean* merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (*mean*) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Persamaan rata-rata (*mean*) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dari nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah peneliti terapkan.

Nilai variabel *X1* terdapat 23 (dua puluh tiga) pertanyaan, nilai tertinggi dari variabel *X1* adalah 115 (23 x 5), sedangkan nilai terendah dari variabel *X1* adalah 23 (23 x 1). Untuk variabel *X2* terdapat 37 (tiga puluh tujuh) pertanyaan, nilai tertinggi dari variabel *X2* adalah 185 (37 x 5), sedangkan nilai terendah dari variabel *X2* adalah 37 (37 x 1). variabel *Y* atau nilai dari variabel *Y* terdapat 21 (dua puluh satu) pertanyaan, maka nilai tertinggi dari variabel *Y* adalah 105 (21 x 5), sedangkan nilai terendah dari variabel *Y* adalah 21 (21 x 1). Nilai variabel *Z* terdapat 17 (enam belas) pertanyaan, nilai tertinggi dari variabel *Z* adalah 85 (17x5), sedangkan nilai terendah dari variabel *Z* adalah 17 (17 x 1).

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. Menurut Sudjana (2005:47) menyatakan bahwa:

1. Tentukan rentang, ialah data tersebar yang dikurangi data terkecil
2. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih menurut keperluan. Cara lain yang cukup bagus untuk n berukuran besar n > 200, misalnya dapat menggunakan aturan sturges, yaitu banyak kelas = 1 + (3,3) log n
3. Terdapat panjang kelas interval p

P = rentang 

banyak kelas

Dengan demikian maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel adalah:

* 1. Kriteria untuk menilai Implementasi Sistem Informasi keuangan Daerah (*X1*), rentang = 18,4 maka penulis menentukan sebagai berikut:
     + 1. Nilai 23 – 41,3 untuk kriteria “Tidak Memadai”
       2. Niali 41,4 –59,7 untuk kriteria “Kurang Memadai”
       3. Nilai 59,8 – 78,1 untuk kriteria “Cukup Memadai”
       4. Nilai 78,2 – 96,5 untuk kriteria “Memadai”
       5. Nilai 96,6 – 115 untuk kriteria “Sangat Memadai”
  2. Kriteria untuk menilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (*X2*), rentang = 29,6 maka penulis menentukan sebagai berikut:

1. Nilai 37 – 66,5 untuk kriteria “Tidak memadai”

2. Niali 66,6 – 96,1 untuk kriteria “Kurang memadai”

3. Nilai 96,2 – 125,7 untuk kriteria “Cukup memadai”

4. Nilai 125,8 – 155,3 untuk kriteria “memadai”

5. Nilai 155,4 – 185 untuk kriteria “Sangat memadai”

* 1. Kriteria untuk menilai Kualitas Laporan Keuangan (Y) rentang

= 16,8 maka penulis menentukan sebagai berikut:

1. Nilai 21 – 37,7 untuk kriteria “Tidak Berkualitas”

2. Niali 37,8 –54,5 untuk kriteria “Kurang Berkualitas”

3. Nilai 54,6– 71,3 untuk kriteria “Cukup Berkualitas”

4. Nilai 71,4 – 88,1 untuk kriteria “Berkualitas”

5. Nilai 88,2 – 105 untuk kriteria “Sangat Berkualitas”

d. Kriteria untuk Akuntabilitas Publik (*Z*), rentang = 13,6 maka penulis menentukan sebagai berikut:

1. Nilai 17 – 30,5 untuk kriteria “Tidak Baik”

2. Niali 30,6– 44,1 untuk kriteria “Kurang Baik”

3. Nilai 44,2– 57,7 untuk kriteria “Cukup Baik”

4. Nilai 57,8– 71,3 untuk kriteria “Baik”

5. Nilai 71,4 – 85 untuk kriteria “Sangat Baik ”

* + 1. **Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Uji validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kesahan (*valid*) dan keandalan (*reliable*) kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Sedangkan uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula.

**3.5.2.1 Uji Validitas**

Pengertian uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2015:121) menyatakan bahwa:

“Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengoreksi skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2015:126) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jika ≥ 0,3, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid
2. Jika ≤ 0,3, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:

rxy

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

Σxy = Jumlah perkalian varabel x dan y

Σx = Jumlah nilai variabel x

Σy = Jumlah nilai variabel y

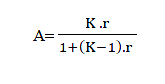
Σx2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel x

Σy2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = Banyaknya sampel

**3.5.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan menggunakan fasilitas SPSS. Suatu instrumen dikatakan *reliable* jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 yang dirumuskan:



Keterangan:

A = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah item reliabilitas

r = Rata-rata korelasi antar item

1. = Bilangan konstan
   * 1. **Rancangan Analisis Data dan Rancangan Uji Hipotesis**
2. **Rancangan Analisis Data**

Rancangan uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pegaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan dampaknya terhadap Akuntabilitas Publik adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Menurut Foster, *et al*, (2006:90) analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen dan kompleksitas model. Keunggulan menggunakan analisis jalur peneliti dapat mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen.

* + - 1. **Merancang Diagram Jalur**

Langkah pertama yang harus dikerjakan sebelum melakukan analisis jalur adalah merancang diagram jalur sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian maka model analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Substruktur I: Ɛ1

Y

X2

X1

PYX1

PYXIX2

PYX2

Substruktur II: Ɛ2

Y

Z

Pyz

Model jalur keseluruhan

Y

X2

X1

Z

Ɛ1 Ɛ2

Pyz

**Gambar 3.2**

**Model Jalur Penelitian**

Keterangan:

Z = Akuntabilitas Publik

Y = Kulaitas Laporan Keuangan

X1 =Implementasi SIKD

X2 =Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PYX1 =Koefisien jalur Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PYX2 =Koefisien jalur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PY X2X2 = Koefisien jalur Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pzy= Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Ɛ = Pengaruh faktor lain

Diagram jalur seperti terlihat pada Gambar 3.2 di atas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

**Y = PYX1X1 + PYX2X2+ Ɛ1**

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

**Z = PZYY + Ɛ2**

* + - 1. **Transformasi Data melalui *Methode of Successive Interval* (MSI)**

Sama halnya dengan analisis regresi, analisis jalur juga membutuhkan data dengan skala minimal interval. Karena data yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah menggunakan analisis jalur terlebih dahulu dilakukan transformasi data. Transformasi data dimaksudkan untuk mengubah suatu skala pengukuran ke dalam skala pengukuran yang lebih tinggi tingkatannya. Transformasi yang dimaksudkan adalah mengubah data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval. Metode yang digunakan untuk melakukan transformasi data tersebut adalah *Methode of Successive Interval* (MSI).

*Methode of Successive Interval* (MSI) adalah merubah data ordinal menjadi skala interval berurutan. Menurut Sambas Ali Muhidin (2011:28) langkah kerja yang dapat dilakukan untuk merubah jenis data ordinal ke data interval melalui *Methode of Successive Interval* (MSI) adalah:

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus:



1. Hitung skor hasil transformasi untuk setiap pernyataan melalui persamaan berikut:

Skor = Nilai skala – Nilai skala minimum + 1

1. Hasil transformasi data dapat dilihat dalam lampiran.
   * + 1. **Uji Normalitas Data**

Analisis jalur termasuk kedalam jenis metode statistika parametrik, menurut kamus statistika metode parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis tentang parameter dalam populasi yang menguraikan secara spesifik bentuk distribusi data, biasanya distribusi normal (Everitt, 2006;293). Karena analisis regresi dan korelasi *product moment* termasuk jenis metode statistika parametrik, maka analisis regresi dan korelasi *product moment* juga memerlukan syarat normalitas data. Pada penelitian ini normalitas data diuji menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan karena merupakan aplikasi uji normalitas yang tersedia pada paket program SPSS 20.

Menurut Singgih Santoso (2002;393)*,* dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (*significance*), yaitu:

* Jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari data adalah normal.
* Jika nilai probabilitas ≤ 0,05 maka distribusi dari data tidak normal

Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan secara visual yaitu melalui grafik normal *probability plots* (Singgih Santoso 2002;322) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

* Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
* Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
  + - 1. **Menghitung Koefisien Jalur**

Selanjutnya untuk memperoleh nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel independen, terlebih dihitung korelasi antar variabel menggunakan rumus korelasi Pearson (*product moment*) sebagai berikut.

****

Nilai korelasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan berpedoman pada tabel berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Interval koefisien** | **Tingkat keeratan hubungan** |
| 0,00 – 0,199 | Korelasi lemah atau tidak ada korelasi |
| 0,20 – 0,399 | Korelasi rendah |
| 0,40 – 0,599 | Korelasi sedang |
| 0,60 – 0,799 | Korelasi kuat |
| 0,80 – 1,000 | Korelasi sangat kuat |

Sumber : Sugiyono (2015:184)

**Tabel 3.7**

**Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi**

Setelah koefisien korelasi antar variabel dihitung, selanjutnya dihitung koefisien jalur. Namun karena kerumitan dalam perhitungan koefisien jalur peneliti menggunakan bantuan software SPSS. Dalam pengolahan menggunakan *software* SPSS, koefisien jalur dapat dilihat pada nilai *standardized coefficients.*

1. **Pengujian Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2013:93), pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan dana. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Adapun langkah-langkah dalam menguji hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha), pemilihan tes statistik, dan perhitungannya, menetapkan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian.

Pengujian hipotesis akan dilakukan secara terpisah pada masing-masing model. Pada model pertama ada sebanyak 4 hipotesis yang akan diuji, yaitu terdiri dari 2 hipotesis secara parsial dan 1 hipotesis secara simultan. Sedangkan untuk model yang kedua hanya terdiri dari 1 hipotesis yaitu secara parsial, hipotesisnya adalah:

**Hipotesis 1 (Parsial)**

H0 : ρYX1 = 0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H1 : ρYX1 ≠ 0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Hipotesis 2 (Parsial)**

H0 : ρYX2 = 0, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H1 : ρYX2 ≠ 0, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Untuk menguji hipotesis 1-2 statistik uji yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

****

Keterangan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ti | = | Statistik uji variabel independen ke-i |
| ρYXi | = | Koefisien jalur variabel independen ke-i terhadap Sistem Informasi Akuntansi |
| N | = | Jumlah sampel |
| K | = | Jumlah variabel independen |
| R2Y(X) | = | Koefisien determinasi |
| Cii | = | Nilai diagonal invers matrik korelasi |

Nilai kritis untuk uji t dilihat dari tabel distribusi t dengan α = 0,05 dan derajat bebas n-k-1, selanjutnya thitung dibandingkan dengan ttabel dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

* Jika t hitung ≤ t tabel , maka Ho diterima
* Jika t hitung > t tabel , maka Ho ditolak

**Hipotesis 3 (Simultan)**

H0 : Semua ρYXi = 0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H1 : Ada ρYXi ≠ 0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pada uji simultan statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus sebagai berikut:

Fhitung = 

Keterangan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | = | Jumlah sampel |
| K | = | Jumlah variabel independen |
| R2 | = | Koefisien determinasi |

Nilai kritis untuk uji F dilihat dari tabel distribusi F dengan α = 0,05 dan derajat bebas (k; n-k-1), selanjutnya Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan ketentuan sebagai berikut:

* Jika F hitung ≤ F tabel , maka Ho diterima
* Jika F hitung > Ftabel , maka Ho ditolak

**Hipotesis 4**

Ho : ρZY = 0, Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.

H1 : ρZY≠ 0 Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.

Untuk menguji hipotesis 4 statistik uji yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

****

Keterangan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T | = | Statistik uji |
| ρZ | = | Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik |
| N | = | Jumlah sampel |
| K | = | Jumlah variabel independen |
| R2 | = | Koefisien determinasi |

Nilai kritis untuk uji t dilihat dari tabel distribusi t dengan α = 0,05 dan derajat bebas n-k-1, selanjutnya thitung dibandingkan dengan ttabel dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

* Jika t hitung ≤ t tabel , maka Ho diterima
* Jika t hitung > t tabel , maka Ho ditolak

**Hipotesis 5**

Ho : Pzyx1x2 = 0 Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Ha : Pzyx1x2 ≠ 0 Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Untuk menguji hipotesis 5 digunakan cara sebagai berikut:

Pzyx1 = Pyx1 x Pzy

Pzyx2 = Pyx2 x Pzy

Keterangan:

Pzyx1= Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Pyx1 = Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Pzy = Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

Pzyx2= Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Pyx2 = Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Gambaran Umum Dinas Kabupaten Bandung**

Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administrative yang jelas, yaitu Kabupaten. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing.

Sajarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota Kabupaten. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede.

Pembentukan dan susunan organisasai dinas kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950). Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan untuk menindak lanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah kabupaten Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dinas Kabupaten Bandung dengan mengikuti Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bandung (lembaran negara repoblik indonesia nomor 82 tahun 2007), dan dalam peraturan menrti dalam negri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan Perda mengenai peraturan pembentukan organisasi yakni Perda no 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung yang kemudian mengalami perubahan hingga sekarang yakni dengan perubahan terakhir yang dijelaskan pada Perda no 16 tahun 2011.

1. **Dinas Bina marga Kabupaten Bandung**

Dinas Bina Marga berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Banjaran Km.3 Soreang,dan dikepalai oleh Bapak Ir.H.AGUS NURIA A. M.Si.

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud di atas Dinas Bina Marga, memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelesaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

.

**VISI MISI DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG**

Dinas Bina Marga dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Jaringan Jalan mantap 74% di Kabupaten Bandung tahun 2017

1. Misi
2. Melakukan penataan struktur dan pola pemanfaatan peranan dan fungsi infrastruktur jalan secara optimal;
3. Menata Sistem Transportasi Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pembinaan Jalan Dengan Tingkat Pelayanan Yang Diperlukan Dalam Sistem Jaringan Jalan.
4. **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung berkedudukan dan berkantor pusat di Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang, dan dikepalai oleh Drs. H. SALIMIN, M.Si.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pendayagunaan data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan dinas

**Visi Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. visi

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017

1. Misi
2. Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Menyediakan Data Base Kependudukan
5. Meningkatkan Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan, Pendayagunaan Data dan Informasi.
   1. **Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berkedudukan dan berkantor pusat di.Raya Soreang Km. 17 Soreang,dan dikepalai oleh dr. Achmad Kustijadi, M.Epid.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan Perbup No. 3  tahun 2008 adalah merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan bidang kesehata

**VISI MISI Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

* 1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat mandiri

* 1. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.
2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktifitas.
3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.
4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan makanan.

Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat.
3. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular.
4. Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
6. Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan.
   1. **Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung berkedudukan dan berkantor pusat di Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang,dan dikepalai oleh Dra. POPI HOPIPAH, M.Si

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud di atas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**VISI MISI Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya pelaku usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan

1. Misi
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur didukung dengan sarana prasarana yang memadai.
3. Memantapkan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan peran sektor perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri.
5. Mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis sumberdaya lokal.
6. Membangun iklim usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
7. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang representatif.
8. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen.
   * + 1. **Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang,dan dikepalai oleh Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum.

**VISI MISI Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan berdaya saing melalui Pengembangan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Unggulan Tahun 2017

1. Misi
   1. Menggali Potensi Sumber Daya Pemuda, Keolahragaan dan Pariwisata
   2. Memberdayakan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri
   3. Mengembangkan Prestasi Olahraga yang Unggul
   4. Mengembangkan Sistem Informasi Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
   5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Jasa Usaha Pariwisata
   6. Mengembangkan Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) dan Kemitraan Pariwisata
   7. Mendorong sektor swasta dalam partisipasi Pengembangan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
      * 1. **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km. 17 Soreang,dan dikepalai oleh Dra. Hj. Siti Nuraini Alimah, M.Si..

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi, pendapatan I, pendapatan II, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

**VISI MISI Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

* 1. Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan dapat dipertangungjawabkan, secara profesional pada Tahun 2017

* 1. Misi

1. Optimalisasi Pendapatan,
2. Pengelolaan keuangan,
3. Efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,
4. Secara professional.
   * + 1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor: Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang,dan dikepalai oleh Bapak Dr. H. Juhana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

**VISI MISI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai nilai budaya lokal dengan berorientasi global

1. Misi
2. Meningkatkan ketersediaaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan Kepastian / keterjaminan layanan pendidikan.
3. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika, etika dan historika.
4. Meningkatkan pencitraan publik melalui tatakelola, transparansi dan akuntabilitas.
   * + 1. **Dinas Perhubungaan**

Dinas Perhubungan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gandasari No. 151 Katapang Kabupaten Bandung, dan dikepalai oleh Bapak Teddy Kusdiana., M.Si.

**VISI MISI Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung**

Dinas Perhubungan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

1. Misi
2. Mengembangkan sistem perhubungan yang handal
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan perhubungan
4. Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
5. Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem perhubungan
6. Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian sistem perhubungan".
   * + 1. **Dinas Pertanian. Perkebunan Dan Kehutanan**

Dinas Pertanian. Perkebunan Dan Kehutanan berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor: Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang,dan dikepalai oleh Bapak Ir. H. A. TISNA UMARAN, MP.

**VISI MISI Dinas Pertanian. Perkebunan Dan Kehutanan**

Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

1. Misi
2. Mengembangkan sistem perhubungan yang handal
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan perhubungan
4. Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
5. Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem perhubungan
6. Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian sistem perhubungan".
   * + 1. **Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan**

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km.17 Soreang,dan dikepalai oleh Ir. Erwin Rinaldi,.M.Sc

**VISI MISI Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan**

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

Visi

Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2017

* + - * 1. Misi

1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan implementatif
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan.
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat
6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
   * + 1. **Dinas Peternakan & Perikanan**

Dinas Peternakan & Perikanan berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km. 17 Soreang,dan dikepalai oleh Bapak Ir. H. Hermawan

Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum.

**VISI MISI Dinas Peternakan & Perikanan**

Dinas Peternakan & Perikanan dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan.

1. Misi
2. Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima.
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul.
4. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam  yang mendukung   keberlanjutan pembangunan Peternakan dan Perikanan.
5. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing.
   * + 1. **Dinas Sosial**

Dinas Sosial berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km. 17 Soreang,dan dikepalai oleh Dra. Hj. NINA SETIANA, M.Si

Dinas Sosial Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum.

**VISI MISI** **Dinas Sosial**

Dinas Sosial dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten bandung

1. Misi
2. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan duniausaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
4. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social.
5. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
6. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   * + 1. **Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km 17 Soreang,dan dikepalai oleh Drs, Rukmana, M.Si.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, latihan dan produktivitas serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

**VISI MISI Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang Mandiri,

Produktif, Profesional dan Berdaya Saing

1. Misi
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja/ Penganggur
3. Melaksanakan Penempatan Bagi Tenaga Kerja Penganggur
4. Melaksanakan Penyuluhan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
5. Mengawasi Pelaksanaan Norma-norma Ketenagakerjaan
   * + 1. **Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi**

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Alamat Kantor : Jl.Raya Soreang Km 17 Soreang,dan dikepalai oleh Bapak Ir. H. Kawaludin

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan Teknis dan Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang meliputi Pengelolaan Irigasi dan Drainase dan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Pertambangan dan Panas Bumi serta Melaksanakan Ketatausahaan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan, Perumusan dan Penentuan Kebijaksanaan Teknis dibidang pengelolaan sumber daya air, yang meliputi bidang irigasi dan drainase.
2. Pelaksanaan, Perumusan dan Penentuan Kebijaksanaan Teknis dibidang pengelolaan Sumber daya mineral, pertambangan dan panas bumi, yang meliputi bidang pertambangan dan energi
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

**VISI MISI** **Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi**

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dalam menjalankan operasinya memiliki visi dan membawa misi yaitu:

1. Visi

Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan kabupaten Bandung yang maju,mandiri dan berdaya saing.

1. Misi
2. Mewudujkan profesional penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan energy
4. meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya air pertambangan dan energi.
   * + 1. **Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di divisi keuangan dan akuntansi pada 14 dinas yang terdapat di Kabupaten Bandung.

Kuesioner yang penulis bagikan kepada responden sejumlah 74 Kuesioner. Pengiriman kuesioner secara langsung dilakukan oleh penulis tanggal 13 Mei 2016 dengan batas akhir penerimaan 23 Mei 2016.

**Tabel 4.1**

**Deskripsi Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Deskripsi Karakteristik Responden** | **Jumlah** | **Presentase** |
| 1 | Jenis Kelamin   * 1. Laki-Laki   2. Perempuan | 34 Orang  40 Orang | 46%  54% |
| 2 | Lama Bekerja   1. 1-5 Tahun 2. 6-10 Tahun 3. 11-20 Tahun 4. 21-30 Tahun 5. >30 Tahun | 07 Orang  06 Orang  41 Orang  18 Orang  02 Orang | 10%  8%  55%  24%  3% |
| 3 | Pendidikan   1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. D3 5. S1 6. Pascasarjana | 00 Orang  00 Orang  15 Orang  02 Orang  47 Orang  10 Orang | 0%  0%  20%  3%  63%  14% |
| 4 | Bagian   1. Keuangan 2. Akuntansi | 45Orang  29 Orang | 61%  39% |

Deskripsi Karakteristik Responden berdasarkan tabel diatas adalah:

1. Dilihat dari jenis kelamin responden wanita lebih banyak dari responden laki-laki yaitu sebanyak 40 orang atau bila dipresentasekan sebesar 54%. Responden laki-laki berjumlah 34 orang atau bila dipresentasekan sebesar 46%.
2. Dilihat dari lama bekerja, jumlah responden yang lama kerjanya 1 sampai 5 tahun sebanyak 7 orang atau bila dipresentasekan sebesar 10%, jumlah responden yang lama bekerjanya 6 sampai 10 tahun sebanyak 6 orang atau bila dipresentasekan sebesar 8%, jumlah responden yang lama bekerjanya 11 sampai 20 tahun berjumlah 41 orang atau bila dipresentasekan sebesar 55%, sedangkan responden yang bekerjanya 21 sampai 30 tahun berjumlah 18 orang atau apabila dipresentasekan sebesar 24%, dan responden yang bekerja diatas 30 tahun berjumlah 2 orang atau bila dipresentasekan sebesar 3%.
3. Dilihat dari jenjang pendidikan, responden terbanyak adalah responden yang berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 47 orang dengan presentase 63%, responden yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 15 orang dengan presentase 20%, responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 2 orang dengan presentase 3%, responden yang berpendidikan terakhir Pascasarjana sebanyak 10 orang dengan presentase 14% dan tidak ada responden yang berpendidikan SLTP, maupun SD.
4. Berdasarkan kelompok pembagian kuesioner penulis mengelompokkan ke 2 bagian yaitu responden bagian Keuangan 45 orang atau 61% dan responden bagian Akuntansi sebanyak 29 orang atau 39%.
   * 1. **Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**

Guna mengetahui gambaran tanggapan responden mengenai implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas-dinas kabupaten bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari 6 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 23 butir pernyataan. Lebih jelasnya berikut ini disajikan distribusi hasil dari jawaban responden berkaitan dengan kualitas sistem informasi untuk masing-masing dimensi.

1. **Perangkat Keras (*Hardware*)**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai perangkat keras(*Hardware*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel dibawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi perangkat keras(*Hardware*) adalah:

1. *Input device*
2. Pengolahan utama
3. *Output device*
4. *Communication device*

Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai perangkat keras (*Hardware*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada dinas-dinas kabupaten Bandung.

**Tabel 4.2**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Perangkat Keras (*Hardware*)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | 52 | 14 | 8 | 0 | 0 | 70,3 | 18,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 50 | 19 | 5 | 0 | 0 | 67,6 | 25,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 42 | 27 | 5 | 0 | 0 | 56,8 | 36,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 34 | 33 | 6 | 1 | 0 | 45,9 | 44,6 | 8,1 | 1,4 | 0,0 |
| 5 | 30 | 34 | 9 | 1 | 0 | 40,5 | 45,9 | 12,2 | 1,4 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **56,2** | **34,3** | **8,9** | **0,6** | **0,0** |

Tabel 4.2 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada dinas-dinas kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 56,2%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 34,3%; yang menjawab “Skor 3” sebesar 8,9% dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 0,6%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah merasa bahwa perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah sangat baik, Namun terdapat responden yang merasa sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak mudah untuk dipahami dan dipelajari, serta kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada awal penggunaannya hal tersebut ditunjukan dengan adanya skor 1 yang artinya “tidak pernah” pada pernyataan no 4 dan 5.

1. **Perangkat Lunak (*Software)***

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai perangkat lunak(*Software*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi perangkat lunak(*Software*) adalah :

1. Sistem operasi
2. Perangkat lunak aplikasi

Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai perangkat lunak (Software) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.3**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Perangkat Lunak (Software)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 6 | 41 | 29 | 2 | 1 | 1 | 55,4 | 39,2 | 2,7 | 1,4 | 1,4 |
| 7 | 44 | 25 | 5 | 0 | 0 | 59,5 | 33,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 47 | 18 | 9 | 0 | 0 | 63,5 | 24,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 42 | 31 | 1 | 0 | 0 | 56,8 | 41,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **58,8** | **34,8** | **5,8** | **0,3** | **0,3** |

Tabel 4.3 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai keluwesan sistem informasi di PT Kereta Api Indonesia (Persero), diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 58,8%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 34,8%, selanjutnya yang menjawab “Skor 3” sebesar 5,8%, selanjutnya yang menjawab “Skor 2”sebesar 0,3% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,3%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya *software* yang terdapat dalamSistem Informasi Keuangan Daerah sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. **Manusia (*Brainware)***

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai manusia (*Brainware*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi manusia (*Brainware*) adalah sumber daya manusia.

Tabel 4.4 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai manusia (*Software*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.4**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Manusia (Brainware)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 10 | 50 | 20 | 4 | 0 | 0 | 67,6 | 27 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 42 | 27 | 5 | 0 | 0 | 56,8 | 36,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 41 | 29 | 3 | 1 | 0 | 55,4 | 39,2 | 4,1 | 1,4 | 0,0 |
| 13 | 27 | 31 | 15 | 1 | 0 | 36,5 | 41,9 | 20,3 | 1,4 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **54,1** | **36,1** | **9,1** | **0,7** | **0,0** |

Tabel 4.4 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai manusia (*Brainware*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 54,1%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 36,1% selanjutnya yang menjawab “Skor 3” sebesar 9,1%, dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 0,7%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah mampu mengopersikan sistem yang terdapat pada dinas, namun terdapat pengguna sistem yang masih belum begitu menguasai mengenai sistem yang digunakan pada dinas hal tersebut ditunjukan dengan adanya skor 2 yakni sebasar 1,4% untuk pernyataan mengenai penguasaan sistem.

1. **Prosedur (*Procedure*)**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai prosedur (*Procedure*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi prosedur (*Procedure*) adalah:

1. Prosedur
2. Aktivitas
3. Fungsi

Tabel 4.5 berikut ini menunjukan tanggapan responden mengenai prosedur (*Procedure*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.5**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Prosedur (Procedure)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 14 | 57 | 16 | 1 | 0 | 0 | 77,0 | 21,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 35 | 30 | 9 | 0 | 0 | 47,3 | 40,5 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **65,8** | **29,7** | **4,5** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 4.5 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai prosedur (*Procedure*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 65,8%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 29,7% dan yang menjawab “Skor 3” sebesar 4,5%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya prosedur yang digunakan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah telah dillakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan..

1. **Basis Data (*Database)***

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai basis data (*Database)* yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi basis data (*Database)* adalah:

1. Media penyimpanan
2. Sistem pengolahan
3. Organisasi data

Tabel 4.6 berikut ini menunjukan tanggapan responden mengenai basis data (*Database*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.6**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Basis Data (Database)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 17 | 42 | 28 | 4 | 0 | 0 | 56,8 | 37,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 45 | 24 | 3 | 2 | 0 | 60,8 | 32,4 | 4,1 | 2,7 | 0,0 |
| 19 | 41 | 29 | 2 | 2 | 0 | 55,4 | 39,2 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 20 | 42 | 28 | 2 | 2 | 0 | 56,8 | 37,8 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **57,5** | **36,8** | **3,7** | **2,0** | **0,0** |

Tabel 4.6 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai basis data (*Database*) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 57,5%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 36,8%, selanjutnya yang menjawab “Skor 3” sebesar 3,7%, dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 2%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya data yang digunakan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah pada dinas-dinas di Kabupaten Bandung telah tertata dalam penyimpanan data yang aman dan sistematis.

1. **Jaringan Komunikasi (*Communication Network)***

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai jaringan komunikasi (Communication Network) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi Jaringan Komunikasi (Communication Network) adalah:

1. *Local Area Network* (LAN)
2. *Wide Area Network* (WAN)

Tabel 4.7 berikut ini menunjukan tanggapan responden mengenai jaringan komunikasi (Communication Network) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.7**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Jaringan Komunikasi (Communication Network)**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 21 | 41 | 21 | 7 | 3 | 2 | 55,4 | 28,4 | 9,5 | 4,1 | 2,7 |
| 22 | 30 | 16 | 9 | 0 | 19 | 40,5 | 21,6 | 12,2 | 0,0 | 25,7 |
| 23 | 39 | 27 | 8 | 0 | 0 | 52,7 | 36,5 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **49,5** | **28,8** | **10,8** | **1,4** | **9,5** |

Tabel 4.7 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai jaringan komunikasi (Communication Network) yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 49,5%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 28,8%, selanjutnya yang menjawab “Skor 3” sebesar 10,8%, selanjutnya yang menjawab “Skor 2” sebesar 1,4% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 9,5%. Data ini menunjukkan bahwa pada pada dinas-dinas Kabupaten Bandung masih belum menggunaka Jaringan WAN guna mendukung penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada instansi tersebut, hal tersebut terlihat dari besarnya presentasi skor 1 yakni sebesar 9,5%.

* + 1. **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**

Guna mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintahpada pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 37 butir pernyataan. Lebih jelasnya tabel berikut ini menyajikan distribusi hasil skor dari jawaban responden berkaitan dengan sistem pengendalian internal pemerintah.

1. **Lingkungan Pengendalian**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai lingkungan pengendalian, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi kegunaan lingkungan pengendalian adalah:

1. Penegakan Integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

Tabel 4.8 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai lingkungan pengendalian pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.8**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai lingkungan pengendalian**

| **Nomor Pernyataan** | **Alternatif Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | 42 | 31 | 1 | 0 | 0 | 56,8 | 41,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 31 | 23 | 20 | 0 | 0 | 41,9 | 31,1 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 23 | 35 | 13 | 3 | 0 | 31,1 | 47,3 | 17,6 | 4,1 | 0,0 |
| 4 | 22 | 44 | 5 | 3 | 0 | 29,7 | 59,5 | 6,8 | 4,1 | 0,0 |
| 5 | 25 | 40 | 8 | 1 | 0 | 33,8 | 54,1 | 10,8 | 1,4 | 0,0 |
| 6 | 27 | 39 | 8 | 0 | 0 | 36,5 | 52,7 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 26 | 30 | 15 | 3 | 0 | 35,1 | 40,5 | 20,3 | 4,1 | 0,0 |
| 8 | 29 | 38 | 7 | 0 | 0 | 39,2 | 51,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 24 | 40 | 8 | 2 | 0 | 32,4 | 54,1 | 10,8 | 2,7 | 0,0 |
| 10 | 32 | 30 | 8 | 3 | 1 | 43,2 | 40,5 | 10,8 | 4,1 | 1,4 |
| 11 | 22 | 45 | 7 | 0 | 0 | 29,7 | 60,8 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 39 | 33 | 0 | 2 | 0 | 52,7 | 44,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **38,5** | **48,2** | **11,3** | **1,9** | **0,1** |

Tabel 4.8 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai lingkungan pengendalian pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 38,5%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 48,2%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 11,3%, selanjutnya yang menjawab “Skor 2” sebesar 1,9 dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,1%.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dideskripsikan tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan dari dimensi pengendalian lingkungan.

Secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden berada pada rentang kriteria efektif, artinya pegawai dapat menjaga nilai etika organisasi dengan baik. Indikator integritas dan nilai etika yang menghasilkan rata-rata tertinggi ada pada indikator pimpinan mampu memberikan arahan dan contoh perilaku yang tepat, hasil ini didukung dengan mayoritas responden yang memberikan tanggapan selalu.

Ukuran integritas dan nilai etika yang menghasilkan skor lebih rendah dibandingkan skor rata-rata secara keseluruhan adalah menetapkan dan menjaga nilai etika organisasi. Masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dapat menjadi indikasi bahwa kemauan pegawai dalam menetapkan dan menjaga nilai etika organisasi masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden berada pada rentang kriteria efektif, artinya pegawai telah memiliki komitmen manajemen atas kompetensi dengan baik. Ukuran komitmen manajemen atas kompetensi yang menghasilkan rata-rata tertinggi ada pada aspek tanggungjawabnya secara efektif hasil ini didukung dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu. Ukuran filosofi manajemen yang menghasilkan rata-rata tertinggi ada pada keberpihakan pada pengendalian oleh pimpinan instansi, hasil ini didukung dengan mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang menjadi ukuran dari struktur organisasi. Secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden berada pada rentang kriteria efektif, artinya pegawai telah memahami struktur organisasi dengan baik.

Pernyataan-pernyataan yang menjadi ukuran dari indikator komite audit. Secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden berada pada rentang kriteria efektif, artinya Dinas telah memiliki komite audit yang efektif dan independen dari pihak manajemen dan anggota-anggotanya. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang menjadi ukuran dari indikator penugasan, wewenang dan tanggung jawab. Secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden berada pada rentang kriteria efektif, artinya Dinas telah memiliki pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya.

1. **Penilaian Risiko**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai penilaian risiko, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi penilaian risiko adalah:

1. Identifikasi risiko
2. Analisis risiko

Tabel 4.9 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai penilaian risiko pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.9**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Penilaian Risiko**

| **Nomor Pernyataan** | **Alternatif Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 13 | 14 | 42 | 15 | 3 | 0 | 18,9 | 56,8 | 20,3 | 4,1 | 0,0 |
| 14 | 8 | 49 | 16 | 0 | 1 | 10,8 | 66,2 | 21,6 | 0,0 | 1,4 |
| 15 | 10 | 44 | 15 | 5 | 0 | 13,5 | 59,5 | 20,3 | 6,8 | 0,0 |
| 16 | 7 | 53 | 7 | 6 | 1 | 9,5 | 71,6 | 9,5 | 8,1 | 1,4 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **13,2** | **63,5** | **17,9** | **4,7** | **0,7** |

Tabel 4.9 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai penilaian risiko pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 13,2%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 63,5%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 17,9%, selanjutnya yang menjawab “Skor 2” sebesar 4,7% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,7%. Data ini menunjukkan dinas-dinas tersebut telah melakukan identifikasi risiko dan analisisis risiko secara memadai baik risiko yang muncul dari lingkungan internal maupun luar. Namun demikian masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dapat menunjukkan bahwa pengendalian risiko masih perlu untuk ditingkatkan terutama menyangkut identifikasi risiko yang akan muncul pada saat pengendalian internal dilakukan.

1. **Aktivitas Pengendalian**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai aktivitas pengendalian, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi aktivitas pengendalian, adalah:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkuaan
2. Pembinaan SDM
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan reviu atas indicator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu dan transaksi atas kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem pengendalian internalserta transaksi dan kejadian penting

Tabel 4.10 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai aktivitas pengendalian pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.10**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Kegunaan Aktivitas Pengendalian**

| **Nomor Pernyataan** | **Alternatif Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 17 | 29 | 39 | 3 | 3 | 0 | 39,2 | 52,7 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| 18 | 27 | 41 | 5 | 1 | 0 | 36,5 | 55,4 | 6,8 | 1,4 | 0,0 |
| 19 | 30 | 37 | 5 | 2 | 0 | 40,5 | 50,0 | 6,8 | 2,7 | 0,0 |
| 20 | 23 | 47 | 1 | 3 | 0 | 31,1 | 63,5 | 1,4 | 4,1 | 0,0 |
| 21 | 26 | 43 | 5 | 0 | 0 | 35,1 | 58,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 22 | 51 | 1 | 0 | 0 | 29,7 | 68,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 35 | 36 | 3 | 0 | 0 | 47,3 | 48,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 27 | 41 | 5 | 1 | 0 | 36,5 | 55,4 | 6,8 | 1,4 | 0,0 |
| 25 | 36 | 37 | 0 | 1 | 0 | 48,6 | 50,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 26 | 31 | 38 | 5 | 0 | 0 | 41,9 | 51,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 22 | 43 | 9 | 0 | 0 | 29,7 | 58,1 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 31 | 37 | 6 | 0 | 0 | 41,9 | 50,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 22 | 48 | 3 | 1 | 0 | 29,7 | 64,9 | 4,1 | 1,4 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **37,6** | **55,9** | **5,3** | **1,2** | **0,0** |

Tabel 4.10 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai aktivitas pengendalian pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 37,6%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 55,9%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 5,3% dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 1,2. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan sering, namun demikian masih ada responden yang menyatakan kadang-kadang dan jarang walaupun persentasenya relatif kecil, namun dapat menjadi sinyalemen bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif masih perlu ditingkatkan terutama menyangkut review atas kinerja organisasi dan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

1. **Informasi dan Komunikasi**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai informasi dan komunikasi, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi informasi dan komunikasi, adalah:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Tabel 4.11 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai informasi dan komunikasi pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.11**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Informasi Dan Komunikasi**

| **Nomor Pernyataan** | **Alternatif Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 30 | 26 | 42 | 4 | 1 | 1 | 35,1 | 56,8 | 5,4 | 1,4 | 1,4 |
| 31 | 37 | 24 | 11 | 1 | 1 | 50,0 | 32,4 | 14,9 | 1,4 | 1,4 |
| 32 | 29 | 38 | 6 | 1 | 0 | 39,2 | 51,4 | 8,1 | 1,4 | 0,0 |
| 33 | 24 | 36 | 14 | 0 | 0 | 32,4 | 48,6 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 22 | 36 | 16 | 0 | 0 | 29,7 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **37,3** | **47,6** | **13,8** | **0,8** | **0,5** |

Tabel 4.11 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai informasi dan komunikasi pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 37,3%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 47,6%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 13,8%, yang menjawab “Skor 2” sebesar 0,8% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,5%. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase rata-rata tanggapan responden dapat dikatakan baik artinya Dinas telah menyediakan, memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi yang efektif. Namun demikian untuk masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dan jarang menunjukkan bahwa implementasi dari dimensi informasi dan komunikasi ini masih ada kekurangan.. Adanya keterbatasan sarana pendukung dalam menunjang kegiatan pengenadalian tentunya dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pengendalian internal pada dinas yang bersangkutan.

1. **Pemantauan**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai pemantauan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi pemantauan, adalah:

1. Pemantauan berkelanjutan
2. Evaluasi terpisah
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Tabel 4.12 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai pemantauan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.12**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan**

| **Nomor Pernyataan** | **Alternatif Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 35 | 24 | 46 | 2 | 2 | 0 | 32,4 | 62,2 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 36 | 11 | 53 | 8 | 2 | 0 | 14,9 | 71,6 | 10,8 | 2,7 | 0,0 |
| 37 | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | 47,3 | 50,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **31,5** | **61,3** | **5,4** | **1,8** | **0,0** |

Tabel 4.12 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai pemantauan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 31,5%, selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 61,3%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 15,4% dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 1,8%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari pemantauan, dimana sebagian besar responden menyatakan sering, artinya proses pemantauan kegiatan atas setiap transaksi yang terjadi telah dilakukan dengan efektif, namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dan jarang terutama mengenai pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas serta review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian.

* + 1. **Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**

Guna mengetahui gambaran tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan pada dinas-dinas Kabupaten Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel kualitas laporan keuangan yang terdiri dari 4 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 23 butir pernyataan. Lebih jelasnya tabel berikut ini menyajikan distribusi hasil skor dari jawaban responden berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

1. **Relevan**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai kerelevanan laporan keuangan yang dihasilkan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi kerelevanan laporan keuangan yang dihasilkan adalah:

1. Memiliki manfaat umpan balik
2. Memiliki manfaat prediktif
3. Tepat Waktu
4. Lengkap

Tabel 4.13 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang relevansi laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.13**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai relevansi Laporan Keuangan**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | 32 | 39 | 3 | 0 | 0 | 43,2 | 52,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 31 | 37 | 6 | 0 | 0 | 41,9 | 50,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 35 | 30 | 9 | 0 | 0 | 47,3 | 40,5 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 26 | 43 | 5 | 0 | 0 | 35,1 | 58,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 34 | 34 | 6 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 36 | 31 | 5 | 0 | 2 | 48,6 | 41,9 | 6,8 | 0,0 | 2,7 |
| 7 | 35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 47,3 | 51,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 36 | 37 | 1 | 0 | 0 | 48,6 | 50,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **44,8** | **48,8** | **6,1** | **0,0** | **0,3** |

Tabel 4.13 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung pada dimensi relevan, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 44,8%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 48,8%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 6,1% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,3%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi relevan, dimana sebagian besar responden menyatakan sering, artinya informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuanganyang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dan jarang terutama mengenai laporan keuangan yang dihasilkan kantor dinas sebagai bahan perencanaan.

1. **Andal**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi mengenai keandalan laporan keuangan yang dihasilkan adalah:

1. Penyajian jujur
2. Dapat Diverivikasi
3. Netralitas

Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang Keandalan laporan keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.14**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Keandalan Laporan Keuangan**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 9 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 51 | 17 | 4 | 0 | 2 | 68,9 | 23,0 | 5,4 | 0,0 | 2,7 |
| 11 | 59 | 9 | 6 | 0 | 0 | 79,7 | 12,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 39 | 29 | 6 | 0 | 0 | 52,7 | 39,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 32 | 40 | 2 | 0 | 0 | 43,2 | 54,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 56 | 14 | 4 | 0 | 0 | 75,7 | 18,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 27 | 37 | 7 | 3 | 0 | 36,5 | 50,0 | 9,5 | 4,1 | 0,0 |
| 16 | 50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 67,6 | 27,0 | 2,7 | 1,4 | 1,4 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **61,3** | **32,3** | **5,2** | **0,7** | **0,5** |

Tabel 4.14 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai keandalan laporan keuangan yang disajikan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 61,3%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 32,3%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 5,2%, selanjutnya yang menjawab “Skor 2” sebesar 0,7% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,5%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi andal, dimana sebagian besar responden menyatakan selalu, artinya laporan keuangan yang disajikan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bandung telah disajikan sesuai fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang dan jarang terutama mengenai laporan keuangan yang dihasilkan kantor dinas diarahkan pada kebutuhan umum.

1. **Dapat Dibandingkan**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi dapat dibandingkan adalah:

1. Sebagai pengukuran kinerja Instansi antara selama periode berjalan dengan periode sebelumnya
2. Dapat dijadikan acuan dalam membandingkan kinerja dengan Institusi pemerintah lainnya.

Tabel 4.15 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.15**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Dapat Dibandingkan**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 17 | 46 | 24 | 4 | 0 | 0 | 62,2 | 32,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 51,4 | 25,7 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **56,7** | **29,1** | **14,2** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 4.15 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai tentang sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 56,7%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 29,1% dan yang menjawab “Skor 3” sebesar 14,2%. memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi dapat dibandingkan, dimana sebagian besar responden menyatakan selalu, artinya laporan keuangan yang disajikan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bandung dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang terutama mengenai laporan keuangan yang disajikan Kantor Dinas dapat dijadikan acuan dalam membandingkan kinerja dengan institusi pemerintah lainnya.

1. **Dapat Dipahami**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden tentang sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel dibawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi tentang sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami adalah:

1. Informasi dapat dipahami oleh pengguna
2. Informasi disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

Tabel 4.16 berikut ini menunjukkan tanggapan responden tentang sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.16**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Dapat Dipahami**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 19 | 54 | 14 | 6 | 0 | 0 | 73,0 | 18,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 47 | 24 | 3 | 0 | 0 | 63,5 | 32,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40,5 | 54,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **59,0** | **35,1** | **5,9** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 4.16 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 59%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 35,1% dan yang menjawab “Skor 3” sebesar 5,9%. memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi dapat dipahami, dimana sebagian besar responden menyatakan sering, artinya laporan keuangan yang disajikan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bandung dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang terutama mengenai laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.

* + 1. **Akuntabilitas Publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**

Guna mengetahui gambaran Akuntabilitas pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel Akuntabilitas publik yang terdiri dari 4 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 17 butir pernyataan. Lebih jelasnya tabel berikut ini menyajikan distribusi hasil skor dari jawaban responden berkaitan dengan Akuntabilitas publik.

1. **Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah:

* Penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan.
* Adanya jaminan kepatuhan hukum.
* Pelaporan informasi dan kegiatan sesuai dengan kenyataan yang ada.
* Penegakan hukum dalam instansi pemerintah apabila terjadi kesalahan

Tabel 4.17 berikut ini menunjukkan tanggapan responden dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.17**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | 44 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,5 | 32,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 38 | 29 | 6 | 0 | 1 | 51,4 | 39,2 | 8,1 | 0,0 | 1,4 |
| 3 | 27 | 41 | 6 | 0 | 0 | 36,5 | 55,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 35 | 31 | 8 | 0 | 0 | 47,3 | 41,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 29 | 28 | 17 | 0 | 0 | 39,2 | 37,8 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **46,8** | **41,4** | **11,6** | **0,0** | **0,3** |

Tabel 4.17 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 46,8%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 41,4%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 11,6% dan yang menjawab “Skor 1” sebesar 0,3%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi akuntabilitas hokum dan kejujuran, dimana sebagian besar responden menyatakan sering, artinya dinas telah melakukan upaya yang baik dalam hal penyalahgunaan jabatan dan memberikan jaminan adanya kepatuhan hokum. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang terutama mengenai Kantor Dinas memberikan teguran kepada pegawai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya).

1. **Akuntabilitas Manajerial**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas manajerial, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi akuntabilitas manajerial dalam akuntabilitas publik dinas Kabupaten Bandung adalah:

1. Pengelolaan kegiatan oleh organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. pertanggung jawaban kinerja/proses organisasi

Tabel 4.18 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai akuntabilitas manajerial dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.18**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Manajerial**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 6 | 38 | 33 | 3 | 0 | 0 | 51,4 | 44,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 36 | 35 | 3 | 0 | 0 | 48,6 | 47,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 41 | 31 | 2 | 0 | 0 | 55,4 | 41,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 44 | 28 | 1 | 1 | 0 | 59,5 | 37,8 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 10 | 43 | 25 | 6 | 0 | 0 | 58,1 | 33,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **54,5** | **41,1** | **4,1** | **0,3** | **0,0** |

Tabel 4.18 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas manajerial dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 54,5%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 41,1%, yang menjawab “Skor 3” sebesar 4,1% dan yang menjawab “Skor 2” sebesar 0,3%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi akuntabilitas manajerial, dimana sebagian besar responden menyatakan selalu, artinya dinas telah melakukan upaya yang baik dalam hal pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih adanya responden yang menyatakan kadang-kadang terutama mengenai Kantor Dinas mampu mempertanggungjawabkan proses rencana kerja dengan baik

1. **Akuntabilitas Program**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas program, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi akuntabilitas program adalah:

* Ketercapaian tujuan yang diterapkan dalam program.
* Efektivitas program dalam menghasilkan *outcome* (hasil)
* Pertanggungjawaban program sampai pada pelaksanaan program

Tabel 4.19 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai akuntabilitas manajerial dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.19**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Program**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 11 | 38 | 34 | 2 | 0 | 0 | 51,4 | 45,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 50,0 | 41,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 47,3 | 51,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 46 | 27 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 36,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **52,7** | **43,9** | **3,4** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 4.19 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas program dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 52,7%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 43,9% dan yang menjawab “Skor 3” sebesar 3,4%. Data ini memperlihatkan tanggapan responden terhadap pernyataan yang menjadi ukuran dari dimensi akuntabilitas program, dimana sebagian besar responden menyatakan selalu, artinya dinas telah melakukan upaya yang baik dalam hal pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal dan biaya yang minimal..

1. **Akuntabilitas Kebijakan**

Untuk mengetahui hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas kebijakan, penulis akan menyajikan kuesioner dalam tabel di bawah ini. Adapun indikator yang digunakan untuk dimensi akuntabilitas kebijakan dalam akuntabilitas publik adalah:

* Tujuan dibuat kebijakan.
* Manfaat dibuat kebijakan.
* Pertimbangan kebijakan dimasa depan.

Tabel 4.20 berikut ini menunjukkan tanggapan responden mengenai akuntabilitas kebijakan dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung.

**Tabel 4.20**

**Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kebijakan**

| **Nomor Pernyataan** | **Skor Jawaban Responden** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekuensi** | | | | | **Persentase** | | | | |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 15 | 40 | 32 | 2 | 0 | 0 | 54,1 | 43,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 39 | 32 | 3 | 0 | 0 | 52,7 | 43,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 35 | 34 | 5 | 0 | 0 | 47,3 | 45,9 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Rata-Rata** | | | | | | **51,4** | **44,1** | **4,5** | **0,0** | **0,0** |

Tabel 4.20 di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden mengenai akuntabilitas kebijakan dalam akuntabilitas publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Skor 5” dengan persentase 51,4%; selanjutnya yang menjawab “Skor 4” sebesar 44,1% dan yang menjawab “Skor 3” sebesar 4,5%. Data ini menunjukkan kebijakan yang dilakukan pada dinas kabupaten bandung dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

* + 1. **Pembahasan**
       1. **Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *product moment*  (r) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut.

1. **Uji Validitas Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

**Tabel 4.21**

**Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah**

| **Butir Pertanyaan** | **R** | **rkritis** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 | 0.550 | 0,30 | Valid |
| Item 2 | 0.736 | 0,30 | Valid |
| Item 3 | 0.751 | 0,30 | Valid |
| Item 4 | 0.707 | 0,30 | Valid |
| Item 5 | 0.656 | 0,30 | Valid |
| Item 6 | 0.606 | 0,30 | Valid |
| Item 7 | 0.720 | 0,30 | Valid |
| Item 8 | 0.657 | 0,30 | Valid |
| Item 9 | 0.628 | 0,30 | Valid |
| Item 10 | 0.571 | 0,30 | Valid |
| Item 11 | 0.635 | 0,30 | Valid |
| Item 12 | 0.638 | 0,30 | Valid |
| Item 13 | 0.322 | 0,30 | Valid |
| Item 14 | 0.742 | 0,30 | Valid |
| Item 15 | 0.686 | 0,30 | Valid |
| Item 16 | 0.484 | 0,30 | Valid |
| Item 17 | 0.420 | 0,30 | Valid |
| Item 18 | 0.476 | 0,30 | Valid |
| Item 19 | 0.583 | 0,30 | Valid |
| Item 20 | 0.425 | 0,30 | Valid |
| Item 21 | 0.392 | 0,30 | Valid |
| Item 22 | 0.362 | 0,30 | Valid |
| Item 23 | 0.744 | 0,30 | Valid |

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.21 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

1. **Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pememerintah (X2)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Sistem Pengendalian Internal Pememerintah.

**Tabel 4.22**

**Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem Pengendalian Internal Pememerintah**

| **Butir Pertanyaan** | **R** | **rkritis** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 | 0.582 | 0,30 | Valid |
| Item 2 | 0.582 | 0,30 | Valid |
| Item 3 | 0.558 | 0,30 | Valid |
| Item 4 | 0.538 | 0,30 | Valid |
| Item 5 | 0.517 | 0,30 | Valid |
| Item 6 | 0.446 | 0,30 | Valid |
| Item 7 | 0.614 | 0,30 | Valid |
| Item 8 | 0.581 | 0,30 | Valid |
| Item 9 | 0.643 | 0,30 | Valid |
| Item 10 | 0.499 | 0,30 | Valid |
| Item 11 | 0.708 | 0,30 | Valid |
| Item 12 | 0.534 | 0,30 | Valid |
| Item 13 | 0.661 | 0,30 | Valid |
| Item 14 | 0.379 | 0,30 | Valid |
| Item 15 | 0.382 | 0,30 | Valid |
| Item 16 | 4.811 | 0,30 | Valid |
| Item 17 | 0.508 | 0,30 | Valid |
| Item 18 | 0.498 | 0,30 | Valid |
| Item 19 | 0.405 | 0,30 | Valid |
| Item 20 | 0.698 | 0,30 | Valid |
| Item 21 | 0.790 | 0,30 | Valid |
| Item 22 | 0.703 | 0,30 | Valid |
| Item 23 | 0.532 | 0,30 | Valid |
| Item 24 | 0.327 | 0,30 | Valid |
| Item 25 | 0.606 | 0,30 | Valid |
| Item 26 | 0.664 | 0,30 | Valid |
| Item 27 | 0.397 | 0,30 | Valid |
| Item 28 | 0.498 | 0,30 | Valid |
| Item 29 | 0.504 | 0,30 | Valid |
| Item 30 | 0.473 | 0,30 | Valid |
| Item 31 | 0.532 | 0,30 | Valid |
| Item 32 | 0.689 | 0,30 | Valid |
| Item 33 | 0.548 | 0,30 | Valid |
| Item 34 | 0.566 | 0,30 | Valid |
| Item 35 | 0.435 | 0,30 | Valid |
| Item 36 | 0.318 | 0,30 | Valid |
| Item 37 | 0.584 | 0,30 | Valid |

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.22 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pememerintah sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

1. **Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel kualitas informasi.

**Tabel 4.23**

**Hasil Uji Validitas Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan**

| **Butir Pertanyaan** | **R** | **rkritis** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 | 0.623 | 0,30 | Valid |
| Item 2 | 0.606 | 0,30 | Valid |
| Item 3 | 0.433 | 0,30 | Valid |
| Item 4 | 0.772 | 0,30 | Valid |
| Item 5 | 0.505 | 0,30 | Valid |
| Item 6 | 0.547 | 0,30 | Valid |
| Item 7 | 0.716 | 0,30 | Valid |
| Item 8 | 0.660 | 0,30 | Valid |
| Item 9 | 0.511 | 0,30 | Valid |
| Item 10 | 0.520 | 0,30 | Valid |
| Item 11 | 0.445 | 0,30 | Valid |
| Item 12 | 0.587 | 0,30 | Valid |
| Item 13 | 0.577 | 0,30 | Valid |
| Item 14 | 0.496 | 0,30 | Valid |
| Item 15 | 0.462 | 0,30 | Valid |
| Item 16 | 0.327 | 0,30 | Valid |
| Item 17 | 0.593 | 0,30 | Valid |
| Item 18 | 0.603 | 0,30 | Valid |
| Item 19 | 0.436 | 0,30 | Valid |
| Item 20 | 0.663 | 0,30 | Valid |
| Item 21 | 0.583 | 0,30 | Valid |

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.23 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

1. **Uji Validitas Akuntabilitas Publik (Z)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Akuntabilitas Publik.

**Tabel 4.24**

**Hasil Uji Validitas Kuesioner Akuntabilitas Publik**

| **Butir Pertanyaan** | **R** | **rkritis** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 | 0.684 | 0,30 | Valid |
| Item 2 | 0.613 | 0,30 | Valid |
| Item 3 | 0.726 | 0,30 | Valid |
| Item 4 | 0.703 | 0,30 | Valid |
| Item 5 | 0.588 | 0,30 | Valid |
| Item 6 | 0.750 | 0,30 | Valid |
| Item 7 | 0.763 | 0,30 | Valid |
| Item 8 | 0.792 | 0,30 | Valid |
| Item 9 | 0.789 | 0,30 | Valid |
| Item 10 | 0.842 | 0,30 | Valid |
| Item 11 | 0.577 | 0,30 | Valid |
| Item 12 | 0.610 | 0,30 | Valid |
| Item 13 | 0.700 | 0,30 | Valid |
| Item 14 | 0.709 | 0,30 | Valid |
| Item 15 | 0.748 | 0,30 | Valid |
| Item 16 | 0.747 | 0,30 | Valid |
| Item 17 | 0.685 | 0,30 | Valid |

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.24 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel akuntabilitas publik valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

* + - 1. **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *Cronbach’s-Alpha* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut.

1. **Uji Reliabilitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap pernyataan variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah.

**Tabel 4.25**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem Informasi Keuangan Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,746 | 23 |

Pada tabel 4.25 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah sebesar 0,746 (*Cronbach’s-Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,60. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah memberikan hasil yang konsisten.

1. **Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap pernyataan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

**Tabel 4.26**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,747 | 37 |

Pada tabel 4.26 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner *perceived usefulness* sebesar 0,747 (*Cronbach’s-Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,60. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sudah memberikan hasil yang konsisten.

1. **Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan.

**Tabel 4.27**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,747 | 21 |

Pada tabel 4.27 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner kualitas informasi sebesar 0,747 (*Cronbach’s-Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,60. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan sudah memberikan hasil yang konsisten.

1. **Uji Reliabilitas Akuntabilitas Publik (Y)**

Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap pernyataan variabel Akuntabilitas Publik.

**Tabel 4.28**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Akuntabilitas Publik**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reliability Statistics** | |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,764 | 17 |

Pada tabel 4.28 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi sebesar 0,764 (*Cronbach’s-Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,60. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Publik sudah memberikan hasil yang konsisten.

Rangkuman hasil uji reliabilitas kuesioner dariseluruh variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 4.29**

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Koefisien Reliabilitas** | **Nilai Kritis** | **Keterangan** |
| Variabel X1 | 0,746 | 0,60 | Reliabel |
| Variabel X1 | 0,747 | 0,60 | Reliabel |
| Variabel Y | 0,747 | 0,60 | Reliabel |
| Variabel Z | 0,764 | 0,60 | Reliabel |

* 1. **Analisis Data**
     1. **Analisis Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas-Dinas Kabupaten Bandung**

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari dua puluh tiga (23) butir pernyataan untuk variabel Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, maka total skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.30**

**Tabulasi Skor Jawaban Responden Mengenai**

**Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Dinas Kabupaten Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.**  **Item** | **Skor** |
|
| 1 | 340 |
| 2 | 341 |
| 3 | 333 |
| 4 | 322 |
| 5 | 315 |
| 6 | 330 |
| 7 | 335 |
| 8 | 334 |
| 9 | 337 |
| 10 | 342 |
| 11 | 333 |
| 12 | 332 |
| 13 | 306 |
| 14 | 352 |
| 15 | 350 |
| 16 | 322 |
| 17 | 334 |
| 18 | 334 |
| 19 | 331 |
| 20 | 332 |
| 21 | 318 |
| 22 | 260 |
| 23 | 327 |
| Jumlah | 7560 |
|  |  |

Berdasarkan jumlah skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Dinas Kabupaten Bandung, maka dapat dihitung nilai rata-rata (mean) sebagai berikut:



Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari total skor jawaban 74 responden, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Dinas Kabupaten Bandung termasuk dalam kriteria “sangat Memadai”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 102,60 berada pada interval “96,6 – 115” yang termasuk dalam kategori “Sangat Memadai”. Artinya sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan pada dinas kabupaten Bandung telah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh pencapaian dimensi-dimensi Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai berikut:

* + - 1. *Hardware*

Perangkat keras (*Hardware)* yang digunakan dalam mendukung sistem informasi keuangan daerah pada dinas Kabupaten bandung secara umum telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user)* serta telah menunjang kelancaran aktivitas instansi dengan dengan baik. Pada dimensi *hardware* pernyataan dengan hasil yang paling baik terdapat pada pernyataan no 2dan 3 mengenai spesifikasi *hardware* yang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

* + - 1. *Software*

Sistem informasi keuangna daerah dinas kabupaten Bandung telah memiliki *software* (perangkat lunak) yang baik, yakni dengan *operating system* yang memadai serta *software* pengolahan data laporan keuangan, sistem operasi dan aplikasi akuntansi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user).* Pada dimensi *software* pernyataan dengan hasil yang paling baik terdapat pada pernyataan no 9 mengenai aplikasi yang sudak memenuhi kebutuhan pengguna, namun secara keseluruhan dimensi *software* memiliki penilaian yang baik.

* + - 1. *Brainware*

Sistem informasi keuangan daerah yang digunakan pada dinas Kabupaten Bandung dijalankan dengan baik oleh operator. Sistem informasi keuangan daerah mampu membantu instansi untuk mengerjakan pekerjaandengan lebih mudah,selain itu SDM pada dinas kabupaten Bandung mampu mengoperasikan sistem tersebut dan bertanggungjawab menjalankan sistem sesuai dengan keahliannya. Pada dimensi *brainware* pernyataan dengan hasil yang paling baik terdapat pada pernyataan no 10 dan 12 mengenai kemudahan yang diberikan sistem informasi keuangan daerah serta pertanggungjawaban menjalankan sistem yang sudah sesuai dengan keahlian pegawai.

* + - 1. Prosedur

Dinas-dinas Kabupaten Bandung memiliki sistem informasi keuangan daerah yang sistematis dan baik. Hal tersebut telihat dari bagaimana proses yang dilakukan baik dalam penginputan data ataupun pengoutputan data dilakukan melalui prosedur yang telah sesuai dengan aturan yang ada. Pada dimensi Prosedur pernyataan dengan hasil yang paling baik terdapat pada pernyataan no 14 dan 15 mengenai bagaimana input yang dilakukan dalam sistem telah dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan serta dilakukan berdasarkan informasi yang masuk.

* + - 1. Basis data

Pada dimensi basis data, sistem informasi keuangan daerah pada dinas kabupaten Bandung secara umum telah terlaksana dengan baik.

* + - 1. Jaringan Komunikasi

Pada dimensi Jaringan kounikasi, secara umum sistem informasi keuangan daerah pada dinas kabupaten Bandung hanya menggunakan internet sebagai media jaringan komunikasi, hal tersebut tergambar pada pernyataan no 23.

Walaupun demikian sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Dinas Kabupaten Bandung masih memiliki beberapa kelemahan dengan adanya beberapa poin pertanyaan yang masih mempunyai skor yang cukup rendah, seperti pada kuisioner mengenai jaringan komunikasi. Pada dimensi jaringan komunikasi terdapat pernyataan yang mendapatkan skor paling rendah yaitu 1 (tidak pernah), pernyataan tersebut yakni pernyataan nomor 22 yang berisi mengenai adanya WAN (*Wide Area Network)* pada dinas kabupaten bandung. Dari hasil kuesioner tersebut diketahuibahwa dinas kabupaten bandung belum menyediakan jaringan untuk cakupan yang lebih luas (WAN). Selain pernyataan mengenai jaringan tersebut, terdapat kelemahan lain pada implementasi sistem informasi keuangan daerah yaitu pada pernyataan no 13 mengenai kemampuan SDM pada dinas tersebut untuk mengoperasikan sistem dan aplikasi. Kelemahan lain juga ditunjukan oleh pernyataan no 5, 8 dan 21 dimana masing-masing pernyataan berisi mengenai unit komunikasi, sistem operasi dan jaringan yang belum memadai.

**4.2.3.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Kabupaten Bandung**

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari tiga puluh tujuh (37) butir pernyataan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka total skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.31**

**Tabulasi Skor Jawaban Responden Mengenai**

**Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.**  **Item** | **Skor** |
|
| 1 | 337 |
| 2 | 307 |
| 3 | 300 |
| 4 | 307 |
| 5 | 311 |
| 6 | 315 |
| 7 | 301 |
| 8 | 318 |
| 9 | 308 |
| 10 | 311 |
| 11 | 311 |
| 12 | 331 |
| 13 | 289 |
| 14 | 285 |
| 15 | 281 |
| 16 | 281 |
| 17 | 316 |
| 18 | 316 |
| 19 | 317 |
| 20 | 312 |
| 21 | 317 |
| 22 | 317 |
| 23 | 328 |
| 24 | 316 |
| 25 | 330 |
| 26 | 322 |
| 27 | 309 |
| 28 | 321 |
| 29 | 313 |
| 30 | 313 |
| 31 | 317 |
| 32 | 317 |
| 33 | 306 |
| 34 | 302 |
| 35 | 314 |
| 36 | 295 |
| 37 | 329 |
| Jumlah | 11520 |

Berdasarkan jumlah skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung, maka dapat dihitung nilai rata-rata (mean) sebagai berikut:



Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari total skor jawaban 74 responden, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung termasuk dalam kriteria “Sangat Memadai”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 155,68 berada pada interval “155,4 – 185” yang termasuk dalam kategori “ Sangat Memadai”. Artinya sebagian besar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung sudah memadai. Hal ini didukung oleh pencapaian dimensi-dimensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung telah memadai, hal tersebut terlihat dari bagaimana lingkungan pengendalian yang ada telah diterapkan dengan baik. Dinas Kabupaten Bandung juga telah memiliki aturaan dan standar yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan, selain itu penegakan etika, kepemimpinan seta hubungan dengan instansi lain telah dilaksanakan dengan baik.

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung telah dilakukan dengan baik, yakni sudah adanya mekanismeuntuk mengenali risiko baikdari faktor internal maupun eksternal, selain itu Dinas Kabupaten Bandung melakukan analisis dari dampak yang ditimbulkan dari risiko yang telah terjadi.

1. Aktivitas Pengendalian

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung secara umum memiliki aktivitas pengendalian yang memadai. Pada Dinas Kabupaten Bandung pelaksanaan tugas dan fungsi telah dilakukan sesuaidengan pemisahan deskripsi jabatannya, selain itu pencatatan atas transaksi dan kejadian setiap aktivitas keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung dilakukan secara akurat.

1. Informasi dan Komunikasi

Dalam menunjang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandung, perangkat informasi dan komunikasi yang terdapat pada Dinas Kabupaten Bandung telah disediakan dengan baik. Selain itu, pada Dinas Kabupaten Bandung dilakukan pengelolaansistem informasi secara terus menerus.

1. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pada Dinas Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan baik,hal tersebut dilihat dari bagaimana Dinas Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tindak lanjut atas pemeriksaan audit telah dilaksakan dengan baik.

Walaupun demikian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bandungmasih memiliki kelemahan yaitu penilaian risikoyang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bandung, hal tersebut terlihat dari hasil pernyataan no 13, 14 dan 16 yang masing-masing memiliki skor 1 atau “tidak pernah”, pernyataan tersebut berisi mengenai bagaimana sistem pengendalian pada dinas kabupaten Bandung yang belum melakukan analisis mengenai bagaimana kemungkinan risiko yang dapat diterima serta kurang dilakukannya penilaian risiko yang mungkin ditimbulkan oleh faktor lain. Selain pada dimensi penilaian risiko, kelemahan sistem pengendalian internal pada dinas juga terdapat pada dimensi lingkungan pengendalian untuk indikator pengrekrutan dan pemberhentian SDM yang belum secara baik dilaksanakan, kelemahan selanjutnya ditunjukan indikator lain pada dimensi lingkungan pengendalian yakni penegakan integritas dan nilai etika, dimana pernyataan no 2 menunjukan kurangnya ketegasan terhadap penyimpangan terhadap kebijakan kurang dilakukan.

**4.2.3.3 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kabupaten Bandung**

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari dua puluh satu (21) butir pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan, maka total skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.32**

**Tabulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan**

**Pada Dinas Kabupaten Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.**  **Item** | **Skor** |
|
| 1 | 325 |
| 2 | 321 |
| 3 | 322 |
| 4 | 317 |
| 5 | 324 |
| 6 | 321 |
| 7 | 330 |
| 8 | 331 |
| 9 | 345 |
| 10 | 337 |
| 11 | 349 |
| 12 | 329 |
| 13 | 326 |
| 14 | 348 |
| 15 | 310 |
| 16 | 339 |
| 17 | 338 |
| 18 | 317 |
| 19 | 344 |
| 20 | 340 |
| 21 | 322 |
| Jumlah | 6935 |

Berdasarkan jumlah skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung, maka dapat dihitung nilai rata-rata (mean) sebagai berikut:



Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari total skor jawaban 74 responden, Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung termasuk dalam kriteria “ Sangat Berkualitas”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 93,73 berada pada interval “88,2 – 105” yang termasuk dalam kategori “Sangat Berkualitas”. Artinya sebagian besar pengguna menilai laporan keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung sudah berkualitas. Hal ini didukung oleh dimensi kualitas informasi adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Dinas Kabupaten Bandung telah mampu mengahasilkan laporan keuangan keuangan yang membantu dalam pengembilan keputusan selain itu laporan keuangan yang dihasilkan mampu menegaskan mengenai ekspektasi periode-periode sebelumnya.

1. Andal

Dinas Kabupaten Bandung mampu menghasikan laporan keuangan yang mampu diverifikasi dengan bukti transaksi dimana Dinas Kabupaten Bandung juga selalu melakukan penyimpanan bukti-bukti transaksi sehingga memudahkan dalam pelaksanaan verifikasi.

1. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Kabupaten Bandung mampu digunakan sebagai indikator pengukur kinerja antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria yang diinginkan.

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Kabupaten Bandung telah disajikan sesuai dengan pemahaman pengguna, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh pengguna. Selain itu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan bentuk laporan keuangan yangtelah ditetapkan.

Walaupun demikian laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Kabupaten Bandung masih memiliki kelemahan yaitu dari segi relevansi, hasil pernyataan no 3 menunjukan laporan keuangan yang disajikan belum mampu dijadikan sebagai bahan perencanaanatau indikator untuk memprediksi mengenai bagaimana kinerja pada masa yang akan dating. Selain itu Laporan keuangan yang disajikan Dinas Kabupaten Bandung masih kurang menunjukan kewajaran, hal tersebut terlihat dari hasil pernyataan no 10 mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya Laporan keuangan yang disajikan Dinas Kabupaten Bandung belum diarahkan pada kebutuhan secara umum (perntayaan no 15), sehingga terdapat beberapa pegawai pada dinas Kabupaten Bandung yang tidak dapat memahami mengenai laporan keuangan tersebut. Kelemahan selanjutnya terdapat pada pernyataan no 18 mengenai kemampubandingan laporan keuangan yang dihasilkan, hasil penelitian menunjukan laporan keuangan yang dihasilkan masih belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan kinerja dengan institusi pemerintahan lainnya.

**4.2.3.4 Analisis Akuntabilitas Publik Dinas Kabupaten Bandung**

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari tujuh belas (17) butir pernyataan untuk variabel Akuntabilitas Publik, maka total skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai Akuntabilitas Publik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.33**

**Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Publik Dinas Kabupaten Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.**  **Item** | **Skor** |
|
| 1 | 334 |
| 2 | 325 |
| 3 | 317 |
| 4 | 323 |
| 5 | 308 |
| 6 | 331 |
| 7 | 329 |
| 8 | 335 |
| 9 | 337 |
| 10 | 333 |
| 11 | 332 |
| 12 | 327 |
| 13 | 330 |
| 14 | 341 |
| 15 | 334 |
| 16 | 332 |
| 17 | 326 |
| Jumlah | 5594 |

Berdasarkan jumlah skor hasil tabulasi jawaban responden mengenai akuntabilitas publik Dinas Kabupaten Bandung, maka dapat dihitung nilai rata-rata (mean) sebagai berikut:



Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari total skor jawaban 74 responden, akuntabilitas publik Dinas Kabupaten Bandung termasuk dalam kriteria “Sangat baik”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 75,59 berada pada interval “71,4 – 85” yang termasuk dalam kategori “Sangat baik”. Artinya akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas kabupaten Bandung sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh dimensi akuntabilitas publik yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Dilihat dari hukum dan kejujuran, akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas Kabupaten Bandung dilakukan dengan baik, yakni dengan dilakukannya evaluasi pertanggungjawaban atas kinerja sesuai dengan jabatan yang diduduki, selain itu dinas Kabupaten Bandung mampu menghindari adanya penyalahgunaan jabatan.

1. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas Kabupaten Bandung secara umum telah dilakukan dengan baik, hal tersebut terlihat dari bagaimana dinas Kabupaten Bandung mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasinya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, selain itu dinas Kabupaten Bandung mampu mempertanggungjawabkan mengenai hasil yang telah ada.

1. Akuntabilitas Program

Dinas Kabupaten Bandung mampu melaksanakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang diterapkan, selain itu dinas Kabupaten Bandung juga mampu mempertimbanngkan tingkat efektivitas dan efisiensi atas program kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Akuntabilitas kebijakan

Dilihat dari kebijakan yang ditetapkan oleh dinas Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa dinas Kabupaten Bandung mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian Akuntabilitas publik pada dinas Kabupaten Bandung masih memiliki kelemahan yaitu pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran pernyataan no 2, 4 dan 5 yang menunjukan bahwa dinas Kabupaten Bandung masih belum mampu menghindari adanya penyalahgunaan jabatan dan pelaporan kegiatan yang belum sesuai dengan kenyataan yang ada serta kurannya teguran diberikan untuk pelanggran-pelanggaran yang dilakukan. Kelemahan lain ditunjukan pada akuntabilitas manajerial yakni pernyataan no 10 mengenai pertanggungjawaban proses rencana yang belum baik.

* + 1. **Uji Normalitas Data**

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien jalur, apabila model jalur tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis jalur diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model jalur.

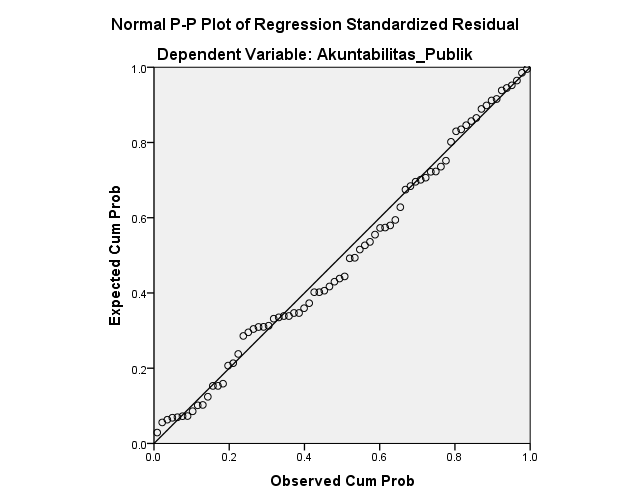
**Tabel 4.34**

**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**



Pada tabel 4.38 dapat dilihat nilai probabilitas (Asymp.sig.2-tailed) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model berdistribusi normal.

Secara visual gambar grafik *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1**

**Grafik Normalitas**

Grafik di atas memperkuat kesimpulan bahwa model yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data persis berada disekitar garis diagonal.

* + 1. **Pengujian Hipotesis**
       1. **Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**

Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. Analisis Jalur merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan berdistibusi normal. Karena data hasil penyebaran kuesioner masih memiliki skala ordinal maka sebelumnya dilakukan konversi data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Sub struktur pertama yang akan diuji adalah pengaruh implementasi sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

**Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial Persamaan 1**

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *IBM SPSS Statistics 20* diperoleh koefisien jalur kedua faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut.

**Tabel 4.35**

**Koefisien Jalur Persamaan I**

| Model | | Standardized Coefficients |
| --- | --- | --- |
| Beta |
| 1 | (Constant) |  |
| X1 | .299 |
| X2 | .482 |

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,299 YX1 (PyX1= 0,299) dan 0,482 YX2 (PyX2= 0,482). Nilai pada tabel 4.39 merupakan nilai koefisien jalur kedua implementasi sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi melalui koefisien jalur dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan factor sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *IBM SPSS Statistics 20* diperoleh nilai thitung pengaruh Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut.

**Tabel 4.36**

**Hasil Uji Parsial Persamaan I**

****

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, maka hasil uji parsial dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hipotesis pertama:

Ho: Pyx1 = 0 ; Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ha: Pyx1 ≠ 0: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai thitung sebesar 2,823 dengan nilai signifikansi (*p-value*) < 0,006. Sementara dari tabel t untuk tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,96. Karena thitung (2,823) lebih besar dibanding ttabel (1,96) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh mardiasmo (2004:35) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Herawati (2014), Mailani (2013), Miftahul Fikri (2011) dan Aristanti Widyaningsih (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hipotesis kedua:

Ho: Pyx2 = 0 ; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ha: Pyx2 ≠ 0: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai thitung sebesar 4,559 dengan nilai signifikansi (*p-value*) < 0,000. Sementara dari tabel t untuk tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,96. Karena thitung (4,559) lebih besar dibanding ttabel (1,96) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:19) menyatakan bahwa tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern,yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyesdiakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaane perusahaan.”

Penelitian mengenai variabel yang sama dilakukan oleh Sutrisno parintak (2015) dan Aristanti Widyaningsih (2011) sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Besarnya koefisien jalur diperlihatkan oleh hasil output diagram jalur dengan menggunakan program SPSS 20. Nilai koefisien jalur keseluruhan variabel dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**ε1**

**(Y)**

0,482

0,299

0,504

**X1**

**X2**

X1

**Gambar 4.2**

**Diagram Jalur Persamaan** **I**

1. **Menghitung Koefisien Determinasi Persamaan I**

Hipotesis ketiga (simultan):

Ho : ρYX1X2 = 0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H1 : ρYX1X2 ≠0, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Melalui nilai koefisien determinasi *(R Square)* dapat diketahui bahwa secara bersama-sama kedua faktor sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 49,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

Melalui nilai koefisien determinasi *(R Square)* dapat diketahui bahwa secara bersama-sama kedua faktor sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 49,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 4.37**

**Koefisien Determinasi Persamaan I**



Besarnya pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 49,6% dan sisanya sebesar 50,4% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua faktor tersebut, seperti audit laporan keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. **Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama**

Hasil pengolahan menggunakan *IBM SPSS Statistics 20* diperoleh nilai Fhitung pengaruh ketiga faktor implementasi sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4.38**

**Hasil Uji Simultan**



Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 34,935 dengan nilai signifikansi (*p-value*) < 0,001. Sementara dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas (2;74) diperoleh nilai Ftabel = 2,467. Karena Fhitung (34,935) lebih besar dibanding Ftabel (2,467) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Weygandt et all (2005) dalam Tuti Herawati (2014) mengungkapkan bahwa Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathinah Putri (2014), Mailani (2013), Miftahul Fikri (2011), Ni Luh Nyoman dkk (2014), Aristanti Widyaningsih (2011) juga menunjukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

* + - 1. **Analisis Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung**
      2. **Menghitung Koefisien Jalur**

Karena variabel independen hanya satu variabel (kualitas laporan keuangan)**,** maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

(Pzy) = *r*yz = (0,685)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS diperoleh koefisien jalur kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan sebagai berikut

**Tabel 4.39**

**Koefisien Jalur Persamaan II**

| Model | | Standardized Coefficients |
| --- | --- | --- |
| Beta |
| 1 | (Constant) |  |
| Y | .685 |

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,685 pada tabel 4.22 merupakan nilai koefisien jalur kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

* + - 1. **Menghitung Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS diperoleh koefisien determinasi besarnya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan sebagai berikut.

**Tabel 4.40**

**Koefisien Determinasi Persamaan II**

****

Besarnya nilai *R square* pada pada tabel *Model Summary*, dimana R *square* = 0,469 = 46,9% ataudengan perhitungan rumus Koefisien Determinasi yaitu:

R2zy = (Pzy)2= (0,685)2

= 0,469

Nilai koefisien determinasi di interpretasikan sebagai besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. Jadi dari hasil penilaian diketahui bahwa kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh sebesar 46,9% terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan sisanya dapat dihitung menggunakan :

ρYε1 = √(1-R *square*)

= √(1-0,469) = 0,531

Angka 0,531 diatas bermakna besarnya faktor lain dalam model diluar variabel kualitas laporan keuangan (Y). Dengan demikian persamaan struktural untuk persamaan II diagram jalurnya sebagai berikut:

**(Y)**

**(Z)**

**ε2**

0,469

0,531

**Gambar 4.3**

**Model Diagram Jalur Persamaan II**

* + - 1. **Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis keempat sebagai berikut:

Ho : ρzy = 0 Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Ha : ρzy ≠ 0 Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Hasil uji t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan digunakan SPSS dan hasilnya adalah :

**Tabel 4.41**

**Hasil Uji-t Persamaan II**



Hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.45 diperoleh nilai thitung pada tabel*coefficients*di atas menunjukkan adanya hubungan antara variabel Y dengan Z sebesar 0,685.Sedangkan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil analisis persamaan I maupun II di atas, maka hasil analisis jalur secara lengkap dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara terperinci pengaruh dan hubungan antar variabel penelitian pada gambar dibawah ini:

**ε1**

**(Y)**

0,482

0,299

0,504

**X1**

**X2**

**(Z)**

**ε2**

0,469

0,531

**Gambar 4.4**

**Model Diagram Jalur Lengkap**

Dari gambar analisis jalur di atas terlihat bahwa pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,299 atau 29,9% dan pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,482 atau 48,2% serta pengaruh langsung Y terhadap Z sebesar 0,469 atau 46,9%.

* + - 1. **Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan.**

Hipoptesis kelima:

Ho : ρzyx = 0 Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Ha : ρzy ≠ 0 Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan.

Pengaruh tidak langsung Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan dapat dihitung dengan mengalikan besar pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

Adapun besar pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan dapat dihitung sebagai berikut:

Pyx1 x Pyz= PZYX1

0.299 x 0,685= PZYX1

0,205 = PZYX1

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,205 atau 20,5% dan sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Perhitungan yang sama dilakukan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah yaitu sebagai berikut:

0,330 = PZYX2

0.482 x 0,685 = PZYX2

Pyx1 x Pyz= PZYX2

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan adalah sebesar 33% dan sisanya sebesar 77 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Atas dasar hal tersebut maka Ho di tolak dan Ha diterima.

* + - 1. **Analisis Pengaruh** **Langsung dan Tidak Langsung terhadap Variabel Akuntabilitas publik**

**Tabel 4.42**

**Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Variabel Kualitas Informasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hubungan** | **Koefisien Jalur** | **Pengaruh Langsung** | **Pengaruh Tidak Langsung** | **Total Pengaruh Terhadap Z** |
| **melalui Y** |
| X1-Y | 0,299 | 0,299 | 0,205 | 0,504 |
| X2-Y | 0,482 | 0,482 | 0,330 | 0,812 |
| Y-Z | 0,469 | 0,469 | - | 0,469 |

**ε1**

**(Y)**

0,482

0,299

0,504

**X1**

**X2**

**(Z)**

**ε2**

0,4695

0,531

0,14

0,227

**Gambar 4.5**

**Diagram jalur lengkap**

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa :

1. - Pengaruh langsung X1 terhadap Y adalah sebesar 0,299

* Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0,205
* Sehingga pengaruh total Xi terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0, 504

1. - Pengaruh langsung X2 terhadap Y adalah sebesar 0,482

* Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0,33
* Sehingga pengaruh total X2 terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0,812

1. Pengaruh langsung Y terhadap Z adalah sebesar 0,469

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas publik, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi sistem informasi keuangan daerah pada dinas-dinas Kabupate Bandung yang berjumlah 14 termasuk pada kategori sangat baik. Hal ini didukung oleh dimensi perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, basis data dan jaringan komunikasi. Namun demikian sistem informasi keuangan daerah secara umum belum menggunakan WAN dalam jaringan komunikasinya, sehingga pada perpindahan data kepada pihak lain yang lebih jauh dinas-dinas Kabupaten Bandung hanya menggunakan Internet.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada dinas-dinas Kabupaten Bandung termasuk pada kategori sangat memadai. Hal ini didukung oleh dimensi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hanya saja dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal ini dinas-dinas Kabupaten Bandung masih kurang mampu dalam menganalisis risiko,baik yang sudah terjadi maupun memprediksi risiko yang akan datang.
3. Kualitas Laporan Keuangan pada dinas-dinas kabupaten Bandung termasuk pada kategori sangat berkualitas. Hal ini didukung oleh dimensi relevan, andal,dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun, dari segi keandalan laporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan oleh dinas-dinas Kabupaten Bandung belum diarahkan untuk kebutuhan secara umum, selain itu dinas-dinas Kabupaten Bandung belum mampu menghindari adanya penundaan penyerahan laporan keuangan sehingga laporan keuangan kurang tepat waktu.
4. Akuntabilitas publik pada dinas-dinas Kabupaten Bandung termasuk pada kategori sangat baik. Hal ini didukung oleh dimensi dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Namun akuntabilitas publik pada dinas pemerintahan kabupaten bandung belum mampu melakukan penindakan secara tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai, sehingga masih banyak pelanggaran oleh pegawai atas peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan.
5. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada dinas-dinas yang berada di Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 29,9%.
6. Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) pada dinas-dinas yang berada di Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 48,2%.
7. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) pada dinas-dinas yang berada di Kabupaten Bandung berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 49,6%
8. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Besarnya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas publik sebesar 46,9%
9. Besarnya Pengaruh tidak langsung Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan adalah sebesar 20,5%. Sedangkan besarnya Pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas publik melalui kualitas laporan keuangan adalah sebesar 33,0%.
   1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 14 Dinas Kabupaten Bandung. Maka penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
2. Dalam implementasi Sisten Informasi Keuangan Daerah pada dinas kabupaten Bandung terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan dengan baik, diantaranya sistem operasi yang digunakan serta unit jaringan komunikasi yang belum tersedia dengan baik, maka sebaiknya instansi menetapkan sistem operasi secara umum sehingga sistem operasi dapat digunakan sesuai dengan kenutuhan pengguna serta sebaiknya instansi menyediakan unit jarinngan komunikasi yang lebih luas namun *private* sehingga perpindahan dapat dilakukan sengan mudah dan aman.
3. Dalam Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan, sebaiknnya instansi melakukan analisis terhadap risiko, baik resiko yang sedang terjadi maupun risiko di masa yang akan datang atas kebijakan yang ditetapkan. Selain itu sebaiknya instansi menetapkan rekruitmen dan pemberhentian pegawai secara jelas sehingga struktur organisasi instansi dapat terkendali dengan jelas.
4. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung mengurangi penundaan penyerahan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu, selain itu sebaiknya laporan keuangan yang disajikan bukan hanya dijadikan sebagai tugas untuk memenuhi tanggungjawab pekerjaan namun juga bisa dijadikan sebagai cerminan kinerja pegawai instansi, sehingga kinerja pegawai instansi dapat diperbandingkan dengan instansi lain melalui laporan keuangan yang disajikan.
5. Dalam meningkatkan akuntabilitas publik dinas Kabupaten Bandung, sebaiknya pimpinan instansi melakukan penindakan secara tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai, sehingga pelanggaran atas peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan dapat berkurang dan memperlihatkan pertanggunjawaban atas tugas yang dimiliki setiap pegawai.
6. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan yaitu untuk menambahkan pernyataan-pernyataan didalam penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta indikator pemantauan yang dinilai sedikit dalam penilaian ini. Selain itu pula memasukan variabel lain di luar yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adnyani, Atmadja dan Herawati. 2014. *Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dan Kekeliruan Laporan Keuangan*. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha .JurusanAkuntansi Program S1. Vol.2 No. 1.

Andriani wiwik, 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan), Dalam *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 5 (1):hal: 69-80.

Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*. Edisi Ketujuh.Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Gunadi, Robert, Sony Loho, Sugianto, 2002. *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba*, PPAK Universitas Brawijaya Malang.

Hafiz, Abdul Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.* Bandung: Alfabeta

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul Muhammad Hanafi, Mamduh. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN.

Halim, Abdul Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Hessel, Nogi S.Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadyah Malang.

Irawati, Susan. 2008. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Fungsi (PSAK) No. 1 Paragraf 9 (Revisi 2009)

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*. Edisi Ketujuh, Indeks. Jakarta (terjemahan).

Mardiasmo. 2004. Otonomi &Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance.* *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2* : 1. (1-17).

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektorpublik.Yogyakarta: Unit Penertbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat

Nazir, Moch. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia

Puspitawati, Lilis Dewi Anggadini, Sri. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010. *Tentang Sistem Informasi keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah..*

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Simbolon Anthon, 2006, *Akuntabilitas Birokrasi Publik,* Edisi Revisi, Penerbit

UGM, Yogyakarta

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta

Susanto, Azhar. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Pertama. Bandung: Lingga Jaya.

Sukmaningrum, Puji Harto. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Jurnal Akuntansi, h:2

Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star- Study & Accounting Research* Vol Xi No 1 2014 ISSN: 1693-4482.

Widjaya, Amin Tunggal. 2013.Pengendalian Internal Mencegah Dan Mendeteksikecurangan. Jakarta

Wibisono, Tri. 2010. Mencapai Tujuan nasional bersama SPIP dan Integritas & Etika Sebagai Pilihan. Warta Pengawasan, Volume XVII. BPKP.

Wiwik Andriani., Reno Fithri Meutia., Sukartini. (2007). *Analisis Penerana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Politeknik Negeri Padang*. Jurnal Akuntansi & Manajemen, *2 : 1.*